



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD)**

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu`alaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh,*

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Gubernur wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor 120.04/926/OTDA tanggal 26 Januari 2022 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 memuat capaian kinerja yang terdiri dari profil daerah, perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 yang memuat data dan informasi yang akan digunakan oleh kepala daerah sebagai bahan untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan sebagai alat deteksi dini permasalahan dalam melaksanakan kebijakan. Keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menjadi bahan yang sangat berharga dalam perumusan kebijakan Pemerintah dan pembangunan daerah tahun berikutnya.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, sehingga terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Maju, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan 2025.

*Wassalamualaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh.*

Pangkalpinang, Maret 2022

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**ERZALDI ROSMAN**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	I-1
a. Undang-undang Pembentukan Daerah.....	I-1
b. Data Geografis Wilayah.....	I-1
c. Jumlah Penduduk.....	I-5
d. Jumlah Kabupaten/Kota (Untuk Provinsi).....	I-5
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah... ..	I-6
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	I-7
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-7
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah....	I-7
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-8
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	I-8
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	I-12
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	I-86
<b>BAB II</b>	
<b>CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	II-1
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	II-1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II-1
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	II-2
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II-49
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-58
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II-61

<b>BAB III</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS</b>	
	<b>PEMBANTUAN</b> .....	III-1
1.	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	III-1
2.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi.....	III-1
3.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	III-2
	3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi.....	III-4
	3.1.1 Target Kinerja.....	III-4
	3.1.2 Realisasi.....	III-9
	3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota.....	III-51
	3.2.1 Target Kinerja.....	III-51
	3.2.2 Realisasi.....	III-51
	3.3 Permasalahan dan Kendala.....	III-51
	3.4 Saran dan Tindak Lanjut.....	III-51
<b>BAB IV</b>	<b>PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN</b>	
	<b>MINIMAL</b> .....	IV-1
4.1	Urusan Pendidikan.....	IV-1
	4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-1
	4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-1
	4.1.3 Realisasi.....	IV-3
	4.1.4 Alokasi Anggaran.....	IV-5
	4.1.5 Dukungan Personil.....	IV-7
	4.1.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-7
4.2	Urusan Kesehatan.....	IV-7
	4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-7
	4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-7
	4.2.3 Realisasi.....	IV-9
	4.2.4 Alokasi Anggaran.....	IV-10
	4.2.5 Dukungan Personil.....	IV-11
	4.2.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-11

4.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-12
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-12
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-13
4.3.3	Realisasi.....	IV-13
4.3.4	Alokasi Anggaran.....	IV-15
4.3.5	Dukungan Personil.....	IV-16
4.3.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-16
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-17
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-17
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-17
4.4.3	Realisasi.....	IV-18
4.4.4	Alokasi Anggaran.....	IV-19
4.4.5	Dukungan Personil.....	IV-19
4.4.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-20
4.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-20
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-20
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-20
4.5.3	Realisasi.....	IV-21
4.5.4	Alokasi Anggaran.....	IV-22
4.5.5	Dukungan Personil.....	IV-23
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-23
4.6	Urusan Sosial.....	IV-24
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-24
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-24
4.6.3	Realisasi.....	IV-29
4.6.4	Alokasi Anggaran.....	IV-35
4.6.5	Dukungan Personil.....	IV-36
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-37
4.7	Program dan Kegiatan.....	IV-38
4.7.1	Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan.....	IV-38
4.7.2	Program dan Kegiatan Urusan	

	Kesehatan.....	IV-59
4.7.3	Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-62
4.7.4	Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat .....	IV-66
4.7.5	Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	IV-67
4.7.6	Program dan Kegiatan Urusan Sosial .....	IV-68
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 69, Kepala Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

#### **1.1.1 Penjelasan Umum**

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Undang-undang pembentukan daerah;

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang ke 32 (tiga puluh dua), dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada awal terbentuknya provinsi, terdapat 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

b. Data geografis wilayah;

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 105°50' sampai 108°30' Bujur Timur dan 1°50' sampai 3°10' Lintang Selatan. Kepulauan Bangka Belitung

terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan *type land utilization*, *land management* dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh *geological formation*, termasuk di dalamnya gaya-gaya teknik dan proses erosi. *Geological formation* tersebut menentukan relief wilayah.

#### 1) Batas Wilayah

Berdasarkan batas wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Selat Karimata di sebelah Timur;
- Laut Jawa di sebelah Selatan;
- Selat Bangka di sebelah Barat; dan
- Laut Natuna di sebelah Utara.

#### 2) Luas Wilayah

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km<sup>2</sup>. Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km<sup>2</sup> atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km<sup>2</sup> atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:

- Kabupaten Bangka luas wilayah :  
2.950,68 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Bangka Barat luas wilayah :  
2.820,61 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Bangka Tengah luas wilayah :  
2.155,77 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Bangka Selatan luas wilayah :  
3.607,08 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Belitung luas wilayah :  
2.293,61 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Belitung Timur luas wilayah :  
2.506,91 km<sup>2</sup>

- Kota Pangkalpinang luas wilayah : 89,40 km<sup>2</sup>

Berdasarkan wilayah administrasi, pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2016 sebagai berikut:

- Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa;
- Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa;
- Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa;
- Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa;
- Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 7 kelurahan dan 42 desa;
- Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa;
- Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

### 3) Topografis

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan Hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulai dari dataran, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa

umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah.

#### 4) Geologi

Kondisi geologi di *wilayah* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pengembangan. Hampir diseluruh wilayah. Material timah (tin), Kaolin, Kuarsa (quartz) dan bilitonite (dikenal dengan nama “satam”). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

#### 5) Hidrologi

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda Shelf) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter.

Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai antara lain: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Kotawaringin, Sungai Ajang Mabat dan Sungai Kurau di Pulau Bangka, sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lenggang.

#### 6) Klimatologi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 67,9 mm sampai dengan 409 mm

atau curah hujan rata-rata per tahun 238,45 mm. Pada bulan Agustus dan September suhu udara berkisar antara 23,5 °C sampai dengan 32,1 °C dengan kelembaban udara terendah 72–73%. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember.

c. Jumlah Penduduk;

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 mencapai 1.461.893 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,93 dan rasio jenis kelamin 108,49. Rasio jenis kelamin di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 sebesar 108,49 yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan.

Tabel 1.1  
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017–2021

Kabupaten /Kota	Penduduk (jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Bangka	324.305	330.793	337.337	343.821	323.107
Belitung	182.418	186.155	189.824	193.493	181.735
Bangka Barat	204.778	209.011	213.163	217.332	200.325
Bangka Tengah	188.603	192.429	196.196	200.016	198.022
Bangka Selatan	201.782	205.901	209.973	213.966	206.246
Belitung Timur	124.587	127.064	129.572	132.069	127.296
Pangkalpinang	204.392	208.520	212.727	216.893	225.162
<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>1.430.865</b>	<b>1.459.873</b>	<b>1.488.792</b>	<b>1.517.590</b>	<b>1.461.893</b>

Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2021)

d. Jumlah Kabupaten/Kota;

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, yang pada saat awalnya terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, serta 1 (satu) Kota yaitu Kota Pangkalpinang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemekaran, dengan membentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Tengah,

Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 7 (tujuh), terdiri dari 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2  
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
Kab. Bangka	Sungailiat	8	8	8	8	8
Kab. Bangka Barat	Muntok	6	6	6	6	6
Kab. Bangka Tengah	Koba	6	6	6	6	6
Kab. Bangka Selatan	Toboali	8	8	8	8	8
Kab. Belitung	Tanjungpandan	5	5	5	5	5
Kab. Belitung Timur	Manggar	7	7	7	7	7
Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	7	7	7	7
<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>		<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)

- e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Perangkat Daerah sebanyak 29 terdiri dari :
1. Sekretariat Daerah (Biro) : 7 unit  
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  2. Inspektorat : 1 unit  
Pergub Nomor 5 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  3. Dinas : 14 unit  
Pergub Nomor 6 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  4. Badan : 6 unit  
Pergub Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka.

5. Sekretariat DPRD : 1 unit  
Pergub Nomor 4 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jumlah pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebanyak 5.386 orang.

- f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.  
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 sebesar Rp.2.848.626.619.540,00 dengan realisasi Rp.2.465.805.270.094,62 atau sebesar 86,56%.

### 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Permasalahan strategis pemerintah daerah;

Pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Sejumlah permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, sehingga menjadi fokus perhatian untuk pembangunan di masa mendatang.

Permasalahan daerah adalah masalah utama daerah yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan.

1. Pertumbuhan ekonomi yang rendah akibat dari Covid-19.
2. Ekspor komoditas strategis yang rendah karena turunnya permintaan pasar global.
3. Produksi dan nilai tambah komoditas unggulan belum optimal.
4. Peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak Covid-19.
5. Pelayanan kesehatan yang belum optimal dan sumber daya kesehatan yang masih rendah.
6. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cukup tinggi.
7. Tingkat pendidikan SDM Babel masih rendah.

8. Rata-rata lama sekolah masih di bawah rata-rata Nasional.
  9. IPM masih di bawah rata-rata Nasional.
  10. Ketersediaan pelabuhan yang belum maksimal.
  11. Rendahnya jangkauan komunikasi dan informatika terutama di wilayah pedesaan.
  12. Reformasi birokrasi belum berjalan optimal.
  13. Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah.
  14. Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana masih rendah.
- b. visi dan misi kepala daerah;
- Visi Kepala Daerah Kepulauan Bangka Belitung adalah **“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**, yang ditempuh melalui 6 (enam) Misi yaitu:
- 1) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
  - 2) Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas;
  - 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal;
  - 4) Meningkatkan Kesehatan Masyarakat;
  - 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi.
  - 6) Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup
- c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah;

Dalam visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, terdapat Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dirumuskan dan ditetapkan menjadi program unggulan pembangunan daerah dengan mencermati, menganalisis dan memperhatikan kaidah-kaidah teknokratik dan aturan penyusunan RPJMD. Program unggulan pembangunan daerah tersebut sebagai berikut:

### **1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan**

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan

pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

## **2. Pembangunan Bahari**

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

## **3. Pengembangan Pariwisata**

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep waterfront city

## **4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan**

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh

perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatnya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

## **5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat**

Fokus kegiatan Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pendampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir

## **6. Pengembangan Energi Dan Infrastruktur Kewilayahan**

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand Babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kementerian ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa

segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

## **7. Pembangunan Pendidikan**

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat Babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti Babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/*entrepreneur* bidang pariwisata di Babel.

## **8. Pembangunan Kesehatan**

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui training, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

## **9. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik**

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama SKPD, Wakil Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM

Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (smart city); Mengutakan sistem pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan administrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di Pemprov melalui fit and proper test dengan lelang jabatan

#### **10. Pembangunan Berdemokrasi**

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembuatan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi

#### **11. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan**

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulangnya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

#### **12. Pengendalian Lingkungan Hidup**

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahan; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca.

- d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah hingga kegiatan prioritas pembangunan daerah. Adapun kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3  
Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	DINAS PENDIDIKAN

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKA</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	<b>KESEHATAN</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KESEHATAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provins	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	DINAS KESEHATAN
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	
	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	DINAS KESEHATAN
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS</b>	RUMAH SAKIT JIWA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	RUMAH SAKIT JIWA
	penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	RUMAH SAKIT JIWA
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	<b>PENATAAN RUANG</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regiona	
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
		RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	
	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		PERMUKIMAN
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	
	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Limbah Domestik Regional	
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	
	<b>SATPOLPP</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
	<b>BPBD</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
	<b>SOSIAL</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS SOSIAL
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	DINAS SOSIAL
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Sosial Provinsi	
	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	DINAS SOSIAL
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	DINAS SOSIAL
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	DINAS SOSIAL
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	DINAS SOSIAL
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	DINAS SOSIAL
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS SOSIAL
	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	DINAS SOSIAL
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS SOSIAL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	DINAS SOSIAL
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
		MASYARAKAT DESA
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA
	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
	<b>TENAGA KERJA</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS TENAGA KERJA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	DINAS TENAGA KERJA
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	DINAS TENAGA KERJA
	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	DINAS TENAGA KERJA
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu)	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAA</b>	DINAS TENAGA KERJA
	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	DINAS TENAGA KERJA
	Pengembangan Satuan Permukiman pada	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Tahap Pemantapan	
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	DINAS TENAGA KERJA
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
	<b>CAPIL</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK,

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
		KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provins	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provins	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provin	
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pelayanan Pencatatan Sipil	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	
	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
		ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provins	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Profil Kependudukan	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, KEPENDUDUK AN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	
	<b>PANGAN</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PANGAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	DINAS PANGAN
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	DINAS PANGAN
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	
	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	DINAS PANGAN
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	DINAS PANGAN
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	
	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	
	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provins	
	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	dengan Kapasitas Produksi	
	Perbenihan Tanaman Hutan	
	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provins	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	DINAS

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN</b>	DINAS LINGKUNGAN

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	<b>MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
		DESA
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah	
	<b>PERHUBUNGAN</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PERHUBUNGAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	DINAS PERHUBUNGAN
	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provins	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provins	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provins	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	
	<b>PTSP</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
		TERPADU SATU PINTU
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		TERPADU SATU PINTU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
	<b>ARSIP</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	
	<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	
	<b>KELUATAN DAN PERIKANAN</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provins	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	DINAS KELAUTAN

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DAN PERIKANAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	
	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	
	<b>KEBUDAYAAN dan PARIWISATA</b>	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	
	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Pengelolaan Museum Provinsi	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provins	
	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provins	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS</b>	DINAS PARIWISATA

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	<b>KEPRAMUKAAN</b>	KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pengelolaan Museum Provinsi	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pariwisata Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PERTANIAN</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PERTANIAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	DINAS PERTANIAN
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	DINAS PERTANIAN
	Penataan Prasarana Pertanian	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	DINAS PERTANIAN
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	
	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	DINAS PERTANIAN

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	DINAS PERTANIAN
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PERTANIAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	DINAS PERTANIAN
	Penataan Prasarana Pertanian	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PERTANIAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	DINAS PERTANIAN
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PERTANIAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	DINAS PERTANIAN
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	
	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penataan Prasarana Pertanian	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penataan Prasarana Pertanian	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Benih Tanaman	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
	<b>KEHUTANAN</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KEHUTANAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	DINAS KEHUTANAN
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	
	Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi	
	Perbenihan Tanaman Hutan	
	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	DINAS KEHUTANAN
	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	DINAS KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	DINAS KEHUTANAN
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KEHUTANAN

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	DINAS KEHUTANAN
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	DINAS KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	DINAS KEHUTANAN
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	DINAS KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Kehutanan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	DINAS KEHUTANAN
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	DINAS KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	DINAS KEHUTANAN
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	DINAS KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	DINAS KEHUTANAN
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	DINAS KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	DINAS KEHUTANAN
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	DINAS KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS KEHUTANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	DINAS KEHUTANAN
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provins	
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	DINAS KEHUTANAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
	ESDM	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Pengalihan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIK A</b>	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerja	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
	<b>SEKRETARIAT</b>	
	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI</b>	SEKRETARIAT

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	<b>DAERAH</b>	DAERAH
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	
	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	
	<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	SEKRETARIAT DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	SEKRETARIAT DAERAH
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Urusan Pemerintahan Daerah	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
	Fasilitasi Keprotokolan	
	<b>DPRD</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	SEKRETARIAT DPRD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	SEKRETARIAT DPRD
	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
	Fasilitasi Tugas DPRD	
	<b>PERENCANAAN</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
		DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
	<b>KEUANGAN</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
	Pembinaan Pengelolaan	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Daerah	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	<b>KEPEGAWAIAN</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
	Mutasi dan Promosi ASN	
	Pengembangan Kompetensi ASN	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Pengembangan Kompetensi Teknis	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
	Fasilitasi Keprotokolan	
	<b>INSPEKTORAT</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	INSPEKTORAT DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	INSPEKTORAT DAERAH
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	INSPEKTORAT DAERAH
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
	Pendampingan dan Asistensi	
	<b>KESATUAN BANGSA</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

Sumber : RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Otonomi yang seluas-luasnya diberikan kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan adalah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme penerapan SPM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib menerapkan SPM untuk 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lebih lanjut penerapan Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan terkait dengan mutu pelayanan dasar, pengaturan lebih rinci ditetapkan oleh masing-masing Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh Menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut, diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dalam penerapan SPM juga harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Untuk itu, mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, namun mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan pada pengumpulan data secara empiris, penghitungan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Perubahan paradigma lainnya mengenai SPM adalah dalam konteks belanja daerah. Telah ditentukan secara tegas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Oleh sebab itu, bukan kinerja pemerintah daerah yang menjadi prioritas utama melainkan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Untuk itu dalam rangka memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat Bangka Belitung. Hal tersebut dalam upaya mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah: **“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang**

***Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.***

Penerapan SPM oleh Pemerintah Provinsi dipandang perlu agar pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadi lebih terukur. Hal ini dikarenakan SPM sudah disertai tolok ukur pencapaian target kinerja yang logis dan riil sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparat Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di daerah

**Dasar Hukum**

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 /Prt/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan

Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

### **Kebijakan Umum**

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dirumuskan kebijakan umum dan program pembangunan pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Kebijakan umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagaimana tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah telah memuat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu : ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***.

Selanjutnya dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022, yaitu:

#### **1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;**

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. ***Pembangunan ekonomi*** adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah perkapita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- b. ***Berbasis potensi daerah*** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah.

**2. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;**

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
- b. **Konektifitas daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;**

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan mempunyai daya saing yang tinggi.

**4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;**

Pernyataan misi ini mengandung makna :

**Kesehatan Masyarakat** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

**5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;**

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
- b. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

**6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;**

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Pengendalian bencana** adalah mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.

- b. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan.
2. Pembangunan Bahari.
3. Pengembangan Pariwisata.
4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan.
5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat .
6. Pengembangan Energi dan Infrastruktur dan Infrastruktur Kewilayahan.
7. Pembangunan Pendidikan.
8. Pembangunan Kesehatan.
9. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik.
10. Pembangunan Berdemokrasi.
11. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan.
12. Pengendalian Lingkungan Hidup.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2021 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pencapaian visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Tahun 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait langsung dengan penerapan SPM diwujudkan antara lain melalui beberapa prioritas antara lain: **pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik serta peningkatan pembangunan bidang kebencanaan.**

Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran

program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

### **Arah Kebijakan**

Tahun 2021 adalah merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Untuk tema prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 adalah **“Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Dasar”**.

Berdasarkan pada tema pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 adalah peningkatan belanja daerah yang dialokasikan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama terkait pasca pandemi Covid-19 seperti Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Trantibunlinmas.

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Capaian Kinerja Makro  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,47	71,69	0,308
2	Angka Kemiskinan	4,89	4,67	-4,499
3	Angka Pengangguran	5,25	5,03	-4,19
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,32	5,05	52,108
5	Pendapatan Per kapita	5.200.651,5	5.833.881,7	12,176
6	Ketimpangan Pendapatan	0,256	0,247	-3,516

*Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021*

#### 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

## 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan (outcome/output 1)				
		Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	68	Dapodik	- SMA 3 Toboali belum Terakreditasi - SMA THB Pangkalinang dalam proses tutup
		Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.400	Keputusan Kepala Dinas Pendidikn Prov. Kep, Babel	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah Menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	20.243	Keputusan Kepala Dinas Pendidikn Prov. Kep, Babel	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	30.435	Dapodik	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah Menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20.243	Dapodik	
		Jumlah kebutuhan Minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Min. 1.963	Analisis Kebutuhan Guru SMA; Dapodik, Oktober 2020	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah Menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	2.131	dapodik	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah Menengah Atas (Negeri dan Swasta)	1.662	Dapodik	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah Menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	1.659	Dapodik	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga Kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Min. 497 tenaga kependidikan	Analisis Kebutuhan Tendik berdasarkan SNP	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	683	Analisis GTK	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	728	Dapodik	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	680	Dapodik	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.681	Dapodik	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.564	Dapodik	
		Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	69	Dapodik	
		Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan	59	Dapodik	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		Jumlah tenaga laboratium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	217	Dapodik	
		Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	176	Dapodik	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	329	Dapodik	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	313	Dapodik	
	(outcome/output 2)				
		Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	9		
		Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	9		
		Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	942		
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus	281		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	178		
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	91		
		Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	80		
		Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	108		
		Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	9		
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	24		
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2		
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	20 Jenis		
		Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	3 Pos		
		Jumlah SDM di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	26 orang		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		provinsi			
		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	41 orang		
		Jumlah kegiatan Edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	10 kegiatan		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	85 item		
		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat Provinsi	33 orang		
		Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang Kemungkinan KLB Lintas kabupaten/kota	0		
<b>3</b>	Pekerjaan Umum (Otcome/output 1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	4.447,07 Ha		
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	140.709,60 m		
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	4447,07 Ha		
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	12,590 m		
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan /rencana	Ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi			
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Ada		
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Talud : 6.735m		
	(Otcome/output 2)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	196.76 Ha		
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	14.180 m		
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	196.76 Ha		
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	14180 m		
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Tida ada		
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Tidak ada		
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	- Revetment/Seawal l = 1657 m; - Bulkhead /Tanggul vertikal= 380		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(Outcome/output 3)	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	65.33		
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	19.70		
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0		
	(Outcome/output 4)	Pemenuhan dokumen RISPAM Lintas kabupaten/kota	Tidak ada		
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	Tidak ada		
		Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	0		
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	3 izin		
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0		
	(Outcome/output 5)	Jumlah SPALD Regional	0		
		Total kapasitas SPALD Regional	0		
		Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	0		
		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	0		
		Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	0		
	(Outcome/output 6)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/79/PU/I/2018 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Menurut Perannya Sebagai Jalan Provinsi. Tanggal:26 Januari 2018.  <b>850,99 km</b>		
		Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	Ada		
		Panjang jalan yang dibangun	0		
		Panjang jembatan yg dibangun	0		
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	31,40 km		
		Panjang jembatan yang diganti /dilebarkan	15 m		
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0		
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0		
		Panjang jalan yang dipelihara	804.88 km		
		Panjang jembatan yang dipelihara	3.793,11 m		
	(Outcome/output 7)	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	1 orang		
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	1.916 orang		
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1482 orang		
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Ada		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	Ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Ada		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada		
		Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Ada		
		Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	Ada		
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Ada		
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada		
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada		
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada		
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan	Ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
4	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0		Tidak ada bencana tahun 2020
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0		
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0		
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0		
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0		
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq$ 10-15 Ha	144,6 ha		
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0		
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0		
		Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	2		
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0		
		Jumlah pengembang yang teregistras	0		
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0		
<b>5</b>	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	121		
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1.060 orang		
		Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	153 unit		
		Jumlah Perda Perkada yang ditegakkan	5 perda/per kada		
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	10 orang		
		Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta	21 SOP		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		penanganan gangguan Trantibum			
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1		
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	1		
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	1		
		Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	1		
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	1		
		Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	1		
		Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	1		
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	1		
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	3		
<b>6</b>	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	25 orang		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	25 orang		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	2 asrama		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	8		
		Jumlah perbekalan kesehatan yang	1 pak obat-		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		disediakan di dalam panti	obatan ringan		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	2 orang		
		Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	1 unit alat tensi meter, 1 unit timbangan		
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di dalam panti	2 orang		
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	16 paket bimbingan		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Sepanjang hari dalam setahun (3 Bimbingan)		
		Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	1 orang		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Kependudukan di dalam panti	3 orang a.n : 1. Very 2. Hasanudin 3. Marzuki		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	25 orang		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	14 orang		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	3 orang		
		Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	3 orang		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	2 unit		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	2 unit		
		Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	1 paket obat-obatan ringan		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	6 orang		
		Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1 unit timbangan badan, 1 unit termogun, 1 unit tensi digital, 1 unit alat ukur tinggi badan.		
		Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	6 orang		
		Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	3 orang		
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	4 paket bimbingan		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Sepanjang hari dalam setahun (3 paket bimbingan)		
		Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk	22 orang		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti			
		Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	5 orang		
		Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	3 orang		
		Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	3 orang		
		Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	12 orang		
		Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	12 orang		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	2 unit		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	11 unit		
		Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1 paket obat-obatan ringan		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	6 orang		
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	Sepanjang hari dalam setahun (5 bimbingan)		
		Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	6		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	3		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Sepanjang hari dalam setahun (3 paket bimbingan)		
		Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	0		
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	12		
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	12		
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	12		
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	0		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	0		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah perbekalan kesehatan yang	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		disediakan di dalam panti			
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	0		
		Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan pembuatan Nomor Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti Induk	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penulsuran keluarga	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	2.167		
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	1.582		
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	5		
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	9		
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0		
		Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	471		
7	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	1		
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0		
		Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja	0		
		Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	0		
		Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi	90		
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	94,73		
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	4,16		
		Persentase penganggur yang dilatih	4,38		
		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	26,04		
		Persentase penyerapan lulusan	35,63		
		Persentase LPK yang terakreditasi	35,62		
		Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) diberikan	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pelatihan yang			
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia(CPMI/CTKI)	0		
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0,83		
		Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	0,86		
		Data tingkat produktivitas total	0		
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	94,06		
		Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	242,7		
		Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n	13.401		
		Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	0		
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	65,66		
		Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	0		
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1,8		
		Jumlah mogok kerja	27		
		Jumlah penutupan perusahaan	1		
		Jumlah perselisihan kepentingan	1		
		Jumlah perselisihan hak	2		
		Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	0		
		Jumlah perselisihan PHK	33		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	137		
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	8		
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	1		
		Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	3.264.884		
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	69,4		
		Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	0		
		Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	0		
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	2		
		Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	89		
		Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	486		
		Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	0		
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dari Pemerintah Daerah Provinsi			
		Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	0		
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) Online/sistem informasi ketenagakerjaan <b>(SISNAKER)</b>	1		
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi keulangannya	0		
		Jumlah izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia (PPTKIS) yang diterbitkan swasta	0		
		Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)	0		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	79		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	256		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	194		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial	192		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	310		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	154		
		Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	0		
		Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Lapori Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	150		
<b>8</b>	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	33		
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	70		
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2		
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1		
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100		
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2		
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	0		
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	3		
		Jumlah lembaga penyedia layanan	2		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi			
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100		
		Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	15		
		Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan Bantuan keuangan/fasilitas Pemerintah Provinsi (APBD provinsi) oleh Daerah	0		
9	Pangan	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tidak Ada		
		Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tidak Ada		
		Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	130		
		Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Tidak ada		
		Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	2 kali		
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada		
		Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Ada		
		Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Ada		
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Tidak ada		
		Teregistrasi dan tersertifikasi pangan	Ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		segar di pasar modern			
10	Pertanahan	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	0		
		Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	0		
		SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	0		
		Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	0		
11	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	a.61,37 b.90,44 c.39,65		
		Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	20		
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	2		
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	1		
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	1		
		Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin	16		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota			
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi pelayanan Adminduk	100		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	24,92		
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	69		
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100		
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	98,38		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada		
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,3		
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	29		
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	73,94		
		Jumlah stakeholders/pemangku	30		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK			
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	13,98		
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,23		
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	100		
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	72,74		
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	50,3		
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	78,57		
15	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	1		
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	100		
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	39,46		
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh	96,29		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Dinas Kominfo			
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	96,29		
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	2		
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	50		
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100		
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100		
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		secara elektronik			
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100		
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100		
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	21,05		
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100		
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100		
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100		
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	88,88		
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	74,07		
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	88,46		
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	4		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	69,53		
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	90		
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	96,92		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	100		
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	21,83		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	76,92		
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	40,22		
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,42		
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1,14		
		Persentase fasilitas penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	12,64		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	6,89		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	5,74		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	18,39		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	9,19		
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	9,81		
		Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	70,1		
		Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	4,89		
		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1,54		
		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi pemasaran	0,34		
		Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	31,34		
		Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	4,89		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi tanggal 28 Juli 2017		
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada		
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada		
		Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>	Tidak Ada		
		Kegiatan pameran penanaman modal	Tidak Ada		
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak Ada		
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	8 pengaduan		
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	713 Perizinan & Non perizinan		
		Laporan realisasi penanaman modal	3.729.655.500.000,-		
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	156 penanaman modal/pekerjaan usaha		
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	85 perusahaan PMA dan PMDN		
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	784 data		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	28		
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	1		
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	188		
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	30		
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	5		
		Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	18		
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	5		
		Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	28.098		
		Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	7		
		20	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	Ada
Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	3 PD				
Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	27 PD				
Jumlah survey Statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	3 PD				
Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	1 PD				

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	75		
		Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	0		
21	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0		
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	86,84		
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	86,84		
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	7,4		
22	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	442		
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan	25		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		keberagaman			
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	7		
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	1		
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	19		
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	1		
		Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	1		
		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	25		
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	25		
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	23		
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	5.409		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	1		
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	5		
		Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	7		
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	9		
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	5		
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	1		
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	2		
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	1		
23	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1,79		
		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	0,944		
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,003		
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	54,32		
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4559		
		Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	2648		
		Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	1851		
		Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	12		
		Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	263		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0		
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0		
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	4		
24	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100		
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100		
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100		
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0		
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0		
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0		
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0		
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0		
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0		
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK			
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya (wpp)	711 WPP		
		Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5-30 GT	493 izin		
		Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	43		
		Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	0		
		Jumlah kapal yang terdaftar	0		
		Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	0		
		Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100		
		Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	82,23		
		Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	56		
		Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa	Tidak ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan			
		Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	35		
		Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	21		
		Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	30 Pokmas was		
		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	0		
26	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	1		
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	2		
		Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	1		
		Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	194586260004		
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	1		
		Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	2,66		
		Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	1,68		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tingkat hunian akomodasi			
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	445		
		Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	223.070		
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1		
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	1		
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	1		
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	1		
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	5		
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	2		
<b>27</b>	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	15		
		Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	76 setifikat		
		Dokumen pengawasan benih yang beredar	1 Dokumen		
		Prasarana pertanian yang digunakan	100		
		Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	34 Ha		
		Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	344 ha		
		Penerbitan izin usaha pertanian	64 izin		
		Persentase sarana pertanian yang digunakan	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase fasilitas penanggulangan bencana	100		
		Persentase jumlah usulan usaha pertanian	100		
28	Kehutanan	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	13		
		Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	23		
		Luas lahan kritis yang direhabilitasi	4634,11 ha		
		Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	385		
		Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	27717		
		Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m <sup>3</sup> per tahun yang aktif	1		
		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	2		
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	17		
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	25		
		Menurunnya gangguan kawasan Tahura	15		
		Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	32		
		Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	33		
		Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	8		
		Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	7		
		Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	6		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	3		
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Perda No 5 Tahun 2016 tentang Konservasi Sumber Daya Air		
		Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Ada		
		Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi	- Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan air tanah Provinsi Kep. Babel dan; - Pergub Nomor 40 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian perizinan air tanah		
		Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi	Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan air tanah Provinsi Kep. Babel		
		Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	Pergub Nomor 17 Tahun 2019 tentang Nilai		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			perolehan air tanah		
		Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kep. Babel tahun 2020-2040		
		Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral</li> <li>- Perda nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan mineral ikutan dan produk samping timah di Provinsi Kep. Babel dan;</li> <li>- Pergub</li> </ul>		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Nomor 59 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, penyesuaian izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan afiliasi serta izin pertambangan rakyat		
		Perda/Pergub terkait IUJP	Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral,		
		Perda/Pergub penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	Pergub Nomor 53 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan harga patokan		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			bukan logam dan batuan di wilayah Provinsi Kep. Babel		
		Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	0		Koordinasi dengan DPMPTSP
		Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Tidak ada		
		SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Tidak ada		
		Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang ketenaga listrikan daerah		
		Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang ketenaga listrikan		
		Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang ketenaga listrikan		
		Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang ketenaga listrikan		
		Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang ketenaga		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	listrikan		
		Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	100		
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	22,22		
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh Fasilitas pengembangan produk	100		
		Persentase pelaku usaha yang Memperoleh pelatihan/fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	100		
		Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	20		
		Jumlah penanganan pengaduan konsumen	19		
		Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	206		
		Jumlah komoditi potensial yang dipantau	1		
		Indeks Kinerja BPSMB	5		
		Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	0		
		Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	0		
		Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	0		
		Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100		
		Pengawasan pupuk dan pestisida Terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	97,02		
		Jumlah barang beredar yang diawasi	10 barang		
		Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi c. Beroperasinya pusat industri d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Ada		
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	10,82		
		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	100		
31	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	0		
		Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	100		
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri besar yang diterbitkan	0		
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dalam 1 provinsi			
		Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	0		
32	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0		
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0		
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	0		

### 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	86,56		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	1697,143		Data dari DP3CSKB tidak valid dengan data DAPODIK
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,238		
		Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		bencana dan/atau berpotensi bencana			
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100		
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	3,93		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	15,30		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	24,18		
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0		
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0		
		Rasio kemantapan jalan	95,87		
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	12		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0		
		Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	0,512		
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	0		
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100		
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	10		
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	50		
		Persentase penanganan pra bencana	42,85		
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100		
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	83,33		
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	178,57		
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan	60		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dasarnya di dalam panti			
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100		
7	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	28,57		
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,21		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1993,373		
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100,86		
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,028		
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	16,22		
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	5,47		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Anak				
		Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	0,16		
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	1,12		
9	Pangan	Persentase Cadangan Pangan	30,13		
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0		
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	0		
		Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota			
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	73,04		
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100		
		Pemanfaatan data kependudukan	357.143		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	0		
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	7,60		
14	Pengendalian Penduduk dan	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,49		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keluarga Berencana				
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,06		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,16		
15	Perhubungan	Rasio konektivitas provinsi	61,39		
		V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,17		
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	96,29		
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	50		
		Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	72,69		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	18,39		
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	4,89		
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	45,62		
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,008		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,054		
		Peningkatan Prestasi Olahraga	18		
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100		
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100		
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	2,58		
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	88,88		
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	68,68		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0,2		
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	229.625 Ton		
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	76,72		
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-78,271		
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	41,06		
		Tingkat hunian akomodasi	0		
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	100		
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	3,72 Ton/Ha		
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	32		
28	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	28,20		
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	4,27		
		Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	22,4		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	100		
		Persentase Desa yang Teraliri Listrik	100		
30	Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	123,76		
		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100		
		Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku	87,94		
		Tertib Usaha	0		
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	87,31		
		Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	76,47		
		Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	2,25		
31	Perindustrian	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	-87,87		
		Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP	50		
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	54,05		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0		
32	Transmigrasi		0		Tidak ada IKK

### 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	30,58		
		Rasio PAD	1,048		
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	87,20		
		Opini Laporan Keuangan	WTP		
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3		

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3		
2	Pemerintahan (Pengadaan)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0		
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	2,25		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100		
3	Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	639,61		
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	75,12		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	33,39		
4	Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-23,58		
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	13,58		
		Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? <b>Ya</b> 2. Apakah ada manual untuk Menyusun daftar asset tetap? <b>Ya</b> 3. Apakah ada proses		

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			inventarisasi asset tahunan? Ya 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? Ya		
		Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	12,22		
5	Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan ( <i>information on resources available to frontline service delivery units</i> )	115,828		
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah ( <i>public access to fiscal information</i> )	100		

## 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

### a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3.1  
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2021	TARGET AKHIR RPJMD TH 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian	4,86	5,98
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	4,35	4,59
3	Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	21,05%	2,25%
4	Meningkatkan PDRB sektor Pertambangan dan Energi	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan Energi	1,76	1,76
5	Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	1,5	2,75
6	Menurunkan tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	5,5	5,40
7	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	64	64,60
8	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,5%	5,00
9	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.409.026	1.479.389

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2021	TARGET AKHIR RPJMD TH 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	86	100
11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	25%	54
12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	69,45%	71,84
13	Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	12,32	13,00
14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah Terakreditasi A	49,25%	60%
15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,1	68,5
16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,08	2,08
17	Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,25	89,05
18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	54%	57,50
19	Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga	0,3	0,50
20	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Sejahtera	65,92%	67%
21	Meningkat Kesehatan Masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	85,92%	86,22
22	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	70	67,50
23	Meningkatkan Kebebasan Sipil	Nilai Kebebasan Sipil	87.82	87,82
24	Meningkatkan Hak-hak politik	Nilai Hak-hak Politik	81,85	81,85

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET TH 2021</b>	<b>TARGET AKHIR RPJMD TH 2022</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
25	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	Nilai Kelembagaan Demokrasi	80,56	80,54
26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,3	0,41
27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,74	75,99

## b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3.2  
Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian	4,86	6,71**	138,06	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	4,35	9,76*	224,36	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	21,05%	-0,18	-0,85	Kurang Berhasil
4	Meningkatkan PDRB sektor Pertambangan dan Energi	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan Energi	1,76	6,93	507,38	Sangat Berhasil
5	Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	1,5	7,80	520	Sangat Berhasil
6	Menurunkan tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	5,5	5,03	109,34	Sangat Berhasil
7	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	64	47,84	74,75	Cukup berhasil
8	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,5%	4,90%	112,24	Sangat Berhasil
9	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.409.026	Rp1.332.736	94	Berhasil

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	86	61,2	71,16	Cukup Berhasil
11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	25	0	0	Kurang Berhasil
12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	69,45%	57,14	82,27	Berhasil
13	Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	12,32	12,17	98,78	Berhasil
14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah Terakreditasi A	49,25	46,8	95,02	Berhasil
15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,1	65,82*	96,65	Berhasil
16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,08	1,84*	113,04	Sangat Berhasil
17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,25	89,02**	99,74	Berhasil
18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	54%	53,67	99,38	Berhasil
19	Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga	0,3	36,67	12.223	Sangat Berhasil
20	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Sejahtera	65,92 %	92,22 %	139,89	Sangat Berhasil
21	Meningkat Kesehatan Masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	85,92%	87,03	101,29	Sangat Berhasil

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	70	66,08*	94,4	Berhasil
23	Meningkatkan Kebebasan Sipil	Nilai Kebebasan Sipil	87,82	79,15	90,12	Berhasil
24	Meningkatkan Hak-hak politik	Nilai Hak-hak Politik	81,85	66,2	80,87	Berhasil
25	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	Nilai Kelembagaan Demokrasi	80,56	92,97	115,40	Sangat Berhasil
26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,3	0,34	113	Sangat Berhasil
27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,74	72,05	95,12	Berhasil

Ket :

\*) Data Tahun 2020

**c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 2.3.3  
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 Dibandingkan Dengan Tahun 2021

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian	6,71	138,06	199,49	turun
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	9,76*	224,36	250,26	turun
3	Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	-0,18	-0,85	-2.274,88	naik
4	Meningkatkan PDRB sektor Pertambangan dan Energi	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan Energi	6,93	507,38	-615,33	naik
5	Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	7,80	520	-513,00	naik
6	Menurunkan tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	5,03	109,34	103,24	naik
7	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	47,84	74,75	106,47	turun

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,90% (Maret 2021)	112,24	118,00	turun
9	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	Rp1.332.736 (Maret 2021)	94	111,39	turun
10	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	61,2	71,16	N.A (Indikator Baru)	-
11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	0	0	N.A (Indikator Baru)	-
12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	57,14	82,27	88,55	turun
13	Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka harapan lama sekolah,	12,17	98,78	100,75	turun
14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah Terakreditasi A	46,8	95,02	120,68	turun
15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,82*	100	97,01	naik
16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,84*	113,04	104,71	naik
17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,02**	99,74	99,90	turun

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	53,67*	99,38	96,70	naik
19	Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga	36,67	12.223	74,29	naik
20	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Sejahtera	92,22 %	139,89	165,86	turun
21	Meningkat Kesehatan Masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	87,03	101,29	106,88	turun
22	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08*	94,4	98,67	turun
23	Meningkatkan Kebebasan Sipil	Nilai Kebebasan Sipil	79,15	90,12	98,94	turun
24	Meningkatkan Hak-hak politik	Nilai Hak-hak Politik	66,2	80,87	94,60	turun
25	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	Nilai Kelembagaan Demokrasi	92,97	115,40	96,15	naik
26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,34	113	75,00	naik
27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	95,12	97,34	turun

Ket :

\*) Data Tahun 2020

\*\*\*) Data sangat sementara (data Primer)

#### d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Tahun RPJMD

Tabel 2.3.4  
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Tahun RPJMD

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2021	STATUS PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian	4,86	6,71	Melebihi target sebesar 1,85
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	5,0	9,76*	Melebihi target sebesar 4,76
3	Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	21,74	-0,18	Target yang belum terealisasi sebesar 21,92
4	Meningkatkan PDRB sektor Pertambangan dan Energi	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan Energi	1,76	6,93	Melebihi target sebesar 5,17
5	Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	2,0	7,80	Melebihi target sebesar 5,80
6	Menurunkan tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	5,6	5,03	Melebihi target sebesar 0,57
7	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	67,12	47,84	Target yang belum terealisasi sebesar 19,28
8	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,00	4,90	Melebihi target sebesar 0,10

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2021	STATUS PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	Rp. 1.479.389	Rp1.332.736	Target yang belum terealisasi sebesar Rp. 146.653,00
10	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	100	61,2	Target yang belum terealisasi sebesar 38,8
11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	54	0	Target yang belum terealisasi sebesar 54
12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	71,84	57,14	Target yang belum terealisasi sebesar 14,70
13	Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	12,5	12,17	Target yang belum terealisasi sebesar 0,33
14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah Terakreditasi A	55	46,8	Target yang belum terealisasi sebesar 8,20
15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,5	65,82*	Target yang belum terealisasi sebesar 2,68
16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,08	1,84*	Melebihi target sebesar 0,24
17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,50	89,02**	Target yang belum terealisasi sebesar 0,48
18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	54,5	53,67	Target yang belum terealisasi sebesar 0,83
19	Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga	0,35	36,67	Melebihi target sebesar 36,32

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2021	STATUS PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Sejahtera	67	92,22	Melebihi target sebesar 25,22
21	Meningkat Kesehatan Masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	86,22	87,03	Melebihi target sebesar 0,81
22	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	67,50	66,08*	Target yang belum terealisasi sebesar 1,42
23	Meningkatkan Kebebasan Sipil	Nilai Kebebasan Sipil	87,82	79,15	Target yang belum terealisasi sebesar 8,67
24	Meningkatkan Hak-hak politik	Nilai Hak-hak Politik	81,85	66,2	Target yang belum terealisasi sebesar 15,65
25	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	Nilai Kelembagaan Demokrasi	80,54	92,97	Melebihi target sebesar 12,43
26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,35	0,34	Target yang belum terealisasi sebesar 0,01
27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,03	72,05	Target yang belum terealisasi sebesar 0,98

Ket :

\*) Data Tahun 2020

## e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Tabel 2.3.5  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian	4,86	6,71	138,06	18.152.829.143,00	10.641.071.313,00	58,62	41,38
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	4,35	9,76*	224,36	53.524.802.035	34.175.348.876	63,85	36,15
3	Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	21,05%	-0,18	-0,85	4.482.939.408	3.222.440.907	71,88	0
4	Meningkatkan PDRB sektor Pertambangan dan Energi	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan Energi	1,76	6,93	507,38	153.687.000,00	121.976.436,00	79,37	20,63
5	Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	1,5	7,80	520	1.598.540.945	1.339.941.471	83,82	16,18
6	Menurunkan tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	5,5	5,03	109,34	6.142.599.520	5.432.753.762	88,44	11,56
7	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	64	47,84	74,75	878.679.625,99	546.730.696,00	62,22	0
8	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,5%	4,90%	112,24	31.495.159.729	28.519.096.469	90,55	9,45

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.409.026	1.332.736	94	1.614.703.941	1.408.217.022	87,21	0
10	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	86	61,2	71,16	284.185.096.443	245.741.546.451	86,47	0
11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	25%	0	0	9.758.297.491	4.848.315.805	49,68	0
12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	69,45%	57,14	82,27	8.822.240.877	7.354.545.498	83,36	0
13	Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	12,32	12,17	98,78	509.747.577.431	478.813.509.720	93,93	0
14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah Terakreditasi A	49,25	46,8	95,02	510.386.526.577	479.290.015.420	93,91	0
15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,1	65,82*	96,65	262.416.365,00	159.309.941,00	60,71	0
16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,08	1,84*	113,04	912.853.836,00	785.431.300,00	86,04	13,96
17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,25	89,02**	99,74	668.378.286,00	494.665.296,00	74,01	0
18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	54%	53,67	99,38	2.966.601.551	2.705.357.429	91,19	0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga	0,3	36,67	12.223	12.090.097.060	11.185.360.832	92,52	7,48
20	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Sejahtera	65,92 %	92,22 %	139,89	3.529.408.719	2.640.585.307	74,82	25,18
21	Meningkat Kesehatan Masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	85,92%	87,03	101,29	77.206.389.446	61.674.103.502	79,88	20,12
22	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	70	66,08*	94,4	577.570.363.039	492.158.578.578	85,21	0
23	Meningkatkan Kebebasan Sipil	Nilai Kebebasan Sipil	87,82	79,15	90,12	1.330.685.447	1.238.326.626	93,06	0
24	Meningkatkan Hak-hak politik	Nilai Hak-hak Politik	81,85	66,2	80,87	108.378.750	99.419.050	91,73	0
25	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	Nilai Kelembagaan Demokrasi	80,56	92,97	115,40	4.344.907.306	3.958.983.300	91,12	8,88
26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,3	0,34	113	7.201.290.898	5.657.872.006	78,57	21,43
27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,74	72,05	95,12	6.557.951.585,00	4.902.931.814,00	74,76	0

Jumlah Efisiensi = Rp. 50.220.041.063

Tingkat efisiensi anggaran dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja anggaran. Semakin kinerja sasarnya tercapai dan penganggarnya masih bersisa dapat dikatakan telah berhasil melakukan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan penghitungan, maka akan diketahui efisien atau tidaknya penggunaan anggaran terhadap pencapaian target sasaran yang sudah ditetapkan.. Dalam memberikan penilaian tingkat efisiensi dapat menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Skala Pengukuran Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja

No	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Anggaran	Kategori
1	100 % s.d. diatas 100 %	< 100	Efisien
2	< 100 %	< 100	Tidak efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 27 indikator sasaran kinerja terdapat 12 indikator kinerja yang penggunaan anggarannya efisien dan 15 indikator kinerja yang penggunaan anggarannya tidak efisien.

Dari 15 indikator kinerja yang efisien dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 50.220.041.063,-** atau terbilang (*Lima puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah*). Dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian dengan persentase capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 138,06% atau kategori **Sangat Berhasil** sedangkan realisasi anggaran 58,62 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 41,38 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 7.511.757.830,00,-**
2. Sasaran Meningkatnya PDRB Sub Sektor perikanan dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan dengan persentase capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 224,36% atau kategori **Sangat Berhasil** sedangkan realisasi anggaran 63,85 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 36,15% dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 19.349.453.159,00,-**
3. Sasaran Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan dan Energi dengan indicator kinerja Laju pertumbuhan PDRB sector Pertambangan dan Energi dengan persentase capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 507,38% atau kategori **Sangat Berhasil** sedangkan realisasi anggaran 79,37% sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 20,63% dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 31.710.564,00,-**
4. Sasaran meningkatnya PDRB sector Industri pengolahan dan perdagangan dengan indicator Laju pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan

Perdagangan dengan persentase capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 520% atau kategori **Sangat Berhasil** sedangkan realisasi anggaran 83,82% sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 16,18% dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 258.599.474,00,-**

5. Sasaran Menurunnya tingkat pengangguran dengan indicator kinerja Tingkat pengangguran Terbuka dengan persentase capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 109,34% atau kategori **Sangat Berhasil** sedangkan realisasi anggaran 88,44% sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 11,56% dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 709.845.758,00,-**
6. Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan dengan Indikator kinerja Persentase angka kemiskinan dengan persentase capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 112,24% atau kategori **Sangat Berhasil** sedangkan realisasi anggaran 90,55% sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 9,45% dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 2.976.063.260,-**
7. Sasaran mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan indicator kinerja laju pertumbuhan penduduk dengan persentase capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 113,04% atau kategori **Sangat Berhasil** sedangkan realisasi anggaran 86,04 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 13,96% dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 127.422.536,-**
8. Sasaran meningkatkan pembangunan olahraga dengan indicator kinerja indeks pembangunan olahraga dengan persentase capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 12.223% atau kategori **Sangat Berhasil** sedangkan realisasi anggaran 92,52% sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 7,48 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 904.736.228,-**
9. Sasaran meningkatkan kesejahteraan social dengan indicator kinerja persentase PMKS Sejahtera dengan persentase capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 139,89% atau kategori **Sangat Berhasil** sedangkan realisasi anggaran 74,82 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 25,18 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 888.823.412,-**
10. Sasaran meningkatkan Kesehatan Masyarakat dengan indicator kinerja Angka kesehatan masyarakat dengan persentase capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 101,29% atau kategori **Sangat Berhasil** sedangkan realisasi anggaran 79,88 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 20,12 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 15.532.285.944,-**
11. Sasaran meningkatkan peran lembaga demokrasi dengan indicator kinerja nilai kelembagaan demokrasi dengan persentase capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 115,40% atau kategori **Sangat Berhasil** sedangkan realisasi anggaran 91,12 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 8,88 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 385.924.006,-**
12. Sasaran meningkatkan Kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dengan indicator kinerja indeks ketahanan daerah dengan persentase capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 113% atau kategori **Sangat Berhasil** sedangkan

realisasi anggaran 78,57 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 21,43 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 1.543.418.892,-**

**f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Pembagian alokasi anggaran disesuaikan dengan sasaran kinerja Pemerintah Daerah tersebut. Secara keseluruhan Total Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.135.693.402.453,99- , sedangkan realisasi Anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.889.116.434.827,00,- atau mencapai 88,45 %

Pada tabel di bawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.

Tabel 2.3.6  
Program dan Anggaran Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	NAMA PROGRAM YANG MENDUKUNG		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya produksi sub sektor pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian	1	Program penyediaan pengembangan sarana pertanian	10.159.976.782,00	6.002.216.215,00	59,08
		2	Program penyediaan pengembangan prasarana pertanian	5.954.054.255,00	3.012.940.262,00	50,60
		3	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	370.296.531,00	318.692.445,00	86,06
		4	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	288.404.933,00	269.092.520,00	93,30
		5	Program penyuluhan pertanian	444.200.865,00	376.114.488,00	84,67
		6	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	138.970.248,00	0	0,00
		7	Program peningkatan di versifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	486.447.906,00	379.619.082,00	78,04
		8	Program penanganan kerawanan pangan	115.450.652,00	91.089.101,00	78,90
		9	Program pengawasan keamanan pangan	195.026.971,00	191.307.200,00	98,09
<b>JUMLAH</b>				<b>18.152.829.143,00</b>	<b>10.641.071.313,00</b>	<b>58,62</b>
Meningkatkan PDRB Sub Sektor	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor	1	Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	920.423.000	902.709.685	98,08

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	NAMA PROGRAM YANG MENDUKUNG		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
perikanan	perikanan	2	Program pengelolaan perikanan tangkap	48.083.878.526	29.258.472.207	60,85
		3	Program pengelolaan perikanan budidaya	718.138.300	546.908.080	76,16
		4	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	3.556.037.711	3.261.575.706	91,72
		5	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	246.324.498	205.683.198	83,50
<b>JUMLAH</b>				<b>53.524.802.035</b>	<b>34.175.348.876</b>	<b>63,85</b>
Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1.528.159.873	770.821.369	50,44
		2	Program pemasaran pariwisata	1.270.954.135	1.121.917.605	88,27
		3	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi Kreatif	695.941.267	584.740.674	84,02
		4	Program pengembangan kebudayaan	272.305.301	185.083.790	67,97
		5	Program pengembangan kesenian tradisional	229.004.668	225.375.420	98,42
		6	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	304.144.133	178.654.700	58,74
		7	Program pengelolaan permuseuman	182.430.031	155.847.349	85,43
<b>JUMLAH</b>				<b>4.482.939.408</b>	<b>3.222.440.907</b>	<b>71,88</b>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	NAMA PROGRAM YANG Mendukung		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatkan PDRB sektor Pertambangan dan Energi	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan Energi	1	Program pengelolaan energy terbaru	7.380.000,00	7.380.000,00	100,00
		2	Program pengelolaan ketenagalistrikan	146.307.000,00	114.596.436,00	78,33
<b>JUMLAH</b>				<b>153.687.000,00</b>	<b>121.976.436,00</b>	<b>79,37</b>
Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	1	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	207.102.794	197.209.655	95,22
		2	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	176.914.348	131.662.300	74,42
		3	Program pengembangan ekspor	12.049.754	11.829.754	98,17
		4	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	270.117.644	225.989.465	83,66
		5	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	48.742.049	44.196.041	90,67
		6	Program perencanaan dan pembangunan industri	829.782.384	682.193.611	82,21
		7	Program pengendalian izin usaha industri	53.831.972	46.860.645	87,05
<b>JUMLAH</b>				<b>1.598.540.945</b>	<b>1.339.941.471</b>	<b>83,82</b>
Menurunkan tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	1	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	135.698.692	115.475.300	85,10
		2	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	139.814.599	135.877.600	97,18
		3	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	2.422.470.126	2.296.720.300	94,81

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	NAMA PROGRAM YANG Mendukung		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
		4	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	397.427.232	259.659.600	65,34
		5	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	868.210.000	757.319.800	87,23
		6	Program pengembangan umkm	1.454.459.528	1.397.323.000	96,07
		7	Program pengembangan iklim penanaman modal	271.883.579	208.702.599	76,76
		8	Program promosi penanaman modal	204.021.983	22.280.300	10,92
		9	Program pelayanan penanaman modal	248.613.781	239.395.263	96,29
<b>JUMLAH</b>				<b>6.142.599.520</b>	<b>5.432.753.762</b>	<b>88,44</b>
Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	1	Program pengawasan ketenagakerjaan	257.208.910,99	106.095.114,00	41,25
		2	Program hubungan industrial	621.470.715,00	440.635.582,00	70,90
<b>JUMLAH</b>				<b>878.679.625,99</b>	<b>546.730.696,00</b>	<b>62,22</b>
Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	1	Program rehabilitasi sosial	882.353.740	698.204.455	79,13
		2	Program pengelolaan taman makam pahlawan	192.056.633	174.166.466	90,68
		3	Program kesejahteraan rakyat	30.420.749.356,00	27.646.725.548,00	90,88

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	NAMA PROGRAM YANG Mendukung		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
<b>JUMLAH</b>				<b>31.495.159.729</b>	<b>28.519.096.469</b>	<b>90,55</b>
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1	Program peningkatan kerjasama desa	70.342.794	52.656.500	74,86
		2	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1.544.361.147	1.355.560.522	87,77
<b>JUMLAH</b>				<b>1.614.703.941</b>	<b>1.408.217.022</b>	<b>87,21</b>
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1	Program pengelolaansumberdaya air (SDA)	32.519.078.155	21.604.371.683	66,44
		2	Program penyelenggaraanjalan	250.583.765.154	223.480.686.644	89,18
		3	Program pengembanganjasakonstruksi	305.666.494	219.402.272	71,78
		4	Program penyelenggaraanpenataanruang	776.586.640	437.085.852	56,28
<b>JUMLAH</b>				<b>284.185.096.443</b>	<b>245.741.546.451</b>	<b>86,47</b>
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	1	Program penataanbangunangedung	6.714.178.706	3.067.516.150	45,69
		2	Program penataanbangunandanlingkungannya	389.446.133	358.483.676	92,05
		3	Program peningkatanprasarana, saranadanutilitasumum (psu)	2.654.672.652	1.422.315.979	53,58
<b>JUMLAH</b>				<b>9.758.297.491</b>	<b>4.848.315.805</b>	<b>49,68</b>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	NAMA PROGRAM YANG Mendukung		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	1	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	6.923.367.605	6.161.215.887	88,99
		2	Program pengelolaan pelayaran	1.898.873.272	1.193.329.611	62,84
<b>JUMLAH</b>				<b>8.822.240.877</b>	<b>7.354.545.498</b>	<b>83,36</b>
Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	1	Program pengelolaan pendidikan	509.747.577.431	478.813.509.720	93,93
<b>JUMLAH</b>				<b>509.747.577.431</b>	<b>478.813.509.720</b>	<b>93,93</b>
Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah Terakreditasi A	1	Program pengembangan kurikulum	541.575.774	408.727.700	75,47
		2	Program pendidik dan tenaga kependidikan	97.373.372	67.778.000	69,61
<b>JUMLAH</b>				<b>1.020.134.104.008</b>	<b>958.103.525.140</b>	<b>93,92</b>
Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	1	Program pemenuhan hak anak (PHA)	113.489.865,00	89.440.141,00	78,81
		2	Program perlindungan khusus anak	148.926.500,00	69.869.800,00	46,92
<b>JUMLAH</b>				<b>262.416.365,00</b>	<b>159.309.941,00</b>	<b>60,71</b>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	NAMA PROGRAM YANG MENDUKUNG		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Program pendaftaran penduduk	32.094.686,00	31.804.000,00	99,09
		2	Program pencatatan sipil	400.000.000,00	393.800.000,00	98,45
		3	Program pengelolaan profil kependudukan	55.042.115,00	45.714.300,00	83,05
		4	Program pengendalian penduduk	43.532.599,00	27.502.200,00	63,18
		5	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	171.410.436,00	126.223.800,00	73,64
		6	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	210.774.000,00	160.387.000,00	76,09
<b>JUMLAH</b>				<b>912.853.836,00</b>	<b>785.431.300,00</b>	<b>86,04</b>
Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	91.435.445,00	75.870.000,00	82,98
		2	Program perlindungan perempuan	253.694.479,00	143.922.100,00	56,73
		3	Program peningkatan kualitas keluarga	323.248.362,00	274.873.196,00	85,03
<b>JUMLAH</b>				<b>668.378.286,00</b>	<b>494.665.296,00</b>	<b>74,01</b>
Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	1	Program pengembangankapasitas daya saing kepemudaan	1.815.931.346	1.621.677.586	89,30
		2	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	1.150.670.205	1.083.679.843	94,18
<b>JUMLAH</b>				<b>2.966.601.551</b>	<b>2.705.357.429</b>	<b>91,19</b>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	NAMA PROGRAM YANG MENDUKUNG		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga	1	Program pengembangan daya saing keolahragaan	12.090.097.060	11.185.360.832	92,52
<b>JUMLAH</b>				<b>12.090.097.060</b>	<b>11.185.360.832</b>	<b>92,52</b>
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Sejahtera	1	Program perlindungan dan jaminan sosial	1.707.841.304	1.192.814.353	69,84
		2	Program pemberdayaan sosial	1.821.567.415	1.447.770.954	79,48
<b>JUMLAH</b>				<b>3.529.408.719</b>	<b>2.640.585.307</b>	<b>74,82</b>
Meningkat Kesehatan Masyarakat Masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	60.546.382.263	47.386.289.508	78,26
		2	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1.336.461.059	1.103.835.392	82,59
		3	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	80.074.571	54.375.939	67,91
		4	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	139.228.000	111.241.000	79,90
		5	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	6.586.406.658	5.876.513.921	89,22
		6	Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan	8.517.836.895	7.141.847.742	83,85
		7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	132.593.501.841	37.683.765.589	28,42
		8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	20.387.243.789	19.295.467.017	94,64

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	NAMA PROGRAM YANG Mendukung		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
<b>JUMLAH</b>				<b>77.206.389.446</b>	<b>61.674.103.502</b>	<b>79,88</b>
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.639.700.427	561.853.111	34,27
		2	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	827.424.853	317.469.532	38,37
		3	Program pengelolaan keuangan daerah	408.935.924.346,00	352.548.257.690,66	86,21
		4	Program pengelolaan barang milik daerah	512.143.562,00	374.939.075,00	73,21
		5	Program pengelolaan pendapatan daerah	1.558.144.148,00	1.202.684.378,00	77,19
		6	Program penyelenggaraan pengawasan	2371464161	2316816036	97,70
		7	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	663617037	568.344.400,00	85,64
		8	Program kepegawaian daerah	1.400.057.588	1.346.365.089	96,16
		9	Program pengembangan sumber daya manusia	851.633.121	792.922.687	93,11
		10	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	56.391.375.656	36.382.927.433	64,52
		11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	82.067.554.620,00	77.283.954.561,00	94,17
		12	Program penataan organisasi	157.773.000,00	124.798.167,00	79,10
		13	Program pemerintahan dan otonomi daerah	4.166.868.010,00	3.591.698.046,00	86,20

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	NAMA PROGRAM YANG MENDUKUNG		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
		15	Program fasilitasi dan koordinasi hukum	922.959.106,00	856.450.827,00	92,79
		16	Program perekonomian dan pembangunan	151.335.827,00	123.080.860,00	81,33
		17	Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	1.407.767.968,00	1.172.170.082,00	83,26
		18	Program kebijakan administrasi pembangunan	261.880.535,00	148.818.035,00	56,83
		19	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	10.307.950.084,00	9.937.988.589,00	96,41
		20	Program pengelolaan aplikasi informatika	2.078.149.627,00	2.041.869.340,00	98,25
		21	Program penyelenggaraan statistik sektoral	240.774.987,00	231.384.987,00	96,10
		22	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	559.048.901,00	178.736.835,00	31,97
		23	Program pengelolaan Arsip	96.815.475,00	55.048.817,00	56,86
<b>JUMLAH</b>				<b>577.570.363.039</b>	<b>492.158.578.578</b>	<b>85,21</b>
Meningkatkan Kebebasan Sipil	Nilai Kebebasan Sipil	1	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1.040.342.456	962.657.495	92,53
		2	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	40.031.991	39.647.381	99,04
		3	Program Pembinaan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	250.311.000	236.021.750	94,29

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	NAMA PROGRAM YANG Mendukung		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
<b>JUMLAH</b>				<b>1.330.685.447</b>	<b>1.238.326.626</b>	<b>93,06</b>
Meningkatkan Hak-hak politik	Nilai Hak-hak Politik	1	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	108.378.750	99.419.050	91,73
<b>JUMLAH</b>				<b>108.378.750</b>	<b>99.419.050</b>	<b>91,73</b>
Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	Nilai Kelembagaan Demokrasi	1	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	437.629.449	160.832.000	36,75
		2	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	3.798.899.107	3.798.151.300	99,98
<b>JUMLAH</b>				<b>4.453.286.056</b>	<b>3.958.983.300</b>	<b>88,90</b>
Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	1	Program penanggulangan bencana	6.728.824.898	5.271.629.114	78,34
		2	Program penanganan bencana	472.466.000	386.242.892	81,75
<b>JUMLAH</b>				<b>7.201.290.898</b>	<b>5.657.872.006</b>	<b>78,57</b>
Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1	Program perencanaan lingkungan hidup	28.740.560,00	23.628.500,00	82,21
		2	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.287.504.010,00	2.123.269.485,00	92,82
		3	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan	7.000.000,00	6.970.000,00	99,57

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	NAMA PROGRAM YANG Mendukung		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
			lingkungan hidup (PPLH)			
		4	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	43.059.999,00	41.292.200,00	95,89
		5	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	20.498.200,00	20.281.500,00	98,94
		6	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	55.494.400,00	46.188.550,00	83,23
		7	Program pengelolaan hutan	2.698.505.619,00	1.720.083.699,00	63,74
		8	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	577.993.514,00	334.270.910,00	57,83
		9	Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	590.713.140,00	515.654.750,00	87,29
		10	Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)	248.442.143,00	71.292.220,00	28,70
<b>JUMLAH</b>				<b>6.557.951.585,00</b>	<b>4.902.931.814,00</b>	<b>74,76</b>

Tingkat efektifitas penggunaan anggaran dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja anggaran. Setelah dilakukan penghitungan, maka akan diketahui efektif atau tidaknya alokasi anggaran terhadap tercapainya target sasaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya capaian tersebut dievaluasi guna mengetahui tingkat keberhasilan dan mendapatkan strategi yang tepat untuk menghindari kegagalan dalam pencapaian target kinerja. Dalam memberikan penilaian tingkat efektifitas dapat menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 2.3.7  
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja 2021

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat efektif
2	90 % sampai 100%	Efektif
3	75 % s.d < 90 %	Cukup efektif
4	Kurang dari 75%	Tidak efektif

Berdasarkan tabel diatas, Efektifitas penggunaan anggaran dapat dirinci sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian jumlah anggaran sebesar Rp. 18.152.829.143,- dapat direalisasikan mencapai 58,62 % dengan hasil capaian kerjanya sebesar 138,06 % sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
2. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya PDRB Sub Sektor perikanan dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan jumlah anggaran sebesar Rp. 53.524.802.035,- dapat direalisasikan mencapai 63,85 % dengan hasil capaian kerjanya sebesar 224,36 % sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
3. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan dengan indicator Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.482.939.408,- dapat direalisasikan mencapai 71,88 % dengan hasil capaian kerjanya sebesar -0,85 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dikategorikan **tidak efektif** .
4. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Pertambangan dan Energi dengan indicator kinerja Laju pertumbuhan

PDRB sector Pertambangan dan Energi jumlah anggaran sebesar Rp. 153.687.000,00,- dapat direalisasikan mencapai 79,37 % dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 507,38 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.

5. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya PDRB sector Industri pengolahan dan perdagangan dengan indicator Laju pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.598.540.945,- dapat direalisasikan mencapai 83,82% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 520 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
6. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Menurunnya tingkat pengangguran dengan indicator kinerja Tingkat pengangguran Terbuka jumlah anggaran sebesar Rp. 6.142.599.520,- dapat direalisasikan mencapai 88,44 % dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 109,34 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
7. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kesejahteraan Tenaga Kerja dengan Indikator kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan jumlah anggaran sebesar Rp. 878.679.625,99,- dapat direalisasikan mencapai 62,22% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 74,75 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **tidak efektif**.
8. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan dengan Indikator kinerja Persentase angka kemiskinan jumlah anggaran sebesar Rp. 31.495.159.729,- dapat direalisasikan mencapai 90,55% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 112,24%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
9. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dengan indicator kinerja Pendapatan Perkapita masyarakat desa jumlah anggaran sebesar Rp. 1.614.703.941,- dapat direalisasikan mencapai 87,21% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 94%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
10. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatkan ketersediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dengan indicator kinerja persentase ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum jumlah anggaran sebesar Rp. 284.185.096.443,- dapat direalisasikan mencapai 86,47% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 71,16%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **tidak efektif**.
11. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dengan indicator kinerja persentase ketersediaan infrastruktur dasar jumlah anggaran sebesar Rp. 9.758.297.491,- dapat

direalisasikan mencapai 49,68% dengan hasil capaian kerjanya sebesar 0 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **tidak efektif**.

12. Alokasi anggaran pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan dengan indikator kinerja persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.822.240.877,- dapat direalisasikan mencapai 83,36% dengan hasil capaian kerjanya sebesar 82,27%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **cukup efektif**.
13. Alokasi anggaran pencapaian sasaran meningkatnya akses pendidikan masyarakat dengan indikator angka harapan lama sekolah jumlah anggaran sebesar Rp. 509.747.577.431,- dapat direalisasikan mencapai 93,93 % dengan hasil capaian kerjanya sebesar 98,78%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
14. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan dengan indikator persentase sekolah terakreditasi A jumlah anggaran sebesar Rp. 510.386.526.577,- dapat direalisasikan mencapai 93,91% dengan hasil capaian kerjanya sebesar 95,02%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
15. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kesejahteraan anak dengan indikator kinerja indeks perlindungan anak (IPA) jumlah anggaran sebesar Rp. 262.416.365,- dapat direalisasikan mencapai 60,71% dengan hasil capaian kerjanya sebesar 96,65 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
16. Alokasi anggaran pencapaian sasaran mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk jumlah anggaran sebesar Rp. 912.853.836,- dapat direalisasikan mencapai 86,04% dengan hasil capaian kerjanya sebesar 113,04 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
17. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya pembangunan responsive gender dengan indikator kinerja indeks pembangunan gender (IPG) jumlah anggaran sebesar Rp. 668.378.286,- dapat direalisasikan mencapai 74,01% dengan hasil capaian kerjanya sebesar 99,74%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
18. Alokasi anggaran pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pemuda dengan indikator kinerja indeks pembangunan pemuda jumlah anggaran sebesar Rp. 2.966.601.551,- dapat direalisasikan mencapai 91,19% dengan hasil capaian kerjanya sebesar 99,38 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
19. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya pembangunan olahraga dengan indikator kinerja indeks pembangunan olahraga jumlah

anggaran sebesar Rp. 12.090.097.060,- dapat direalisasikan mencapai 92,52% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 12.223%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.

20. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kesejahteraan social dengan indicator kinerja persentase PMKS Sejahtera jumlah anggaran sebesar Rp. 3.529.408.719,- dapat direalisasikan mencapai 74,82% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 139,89%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
21. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dengan indicator kinerja Angka kesehatan masyarakat jumlah anggaran sebesar Rp. 77.206.389.446,- dapat direalisasikan mencapai 79,88 % dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 101,29 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
22. Alokasi anggaran pencapaian sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan dengan indicator kinerja Indeks RB jumlah anggaran sebesar Rp. 577.570.363.039,- dapat direalisasikan mencapai 85,21% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 94,4%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
23. Alokasi anggaran pencapaian sasaran meningkatkan kebebasan sipil dengan indicator kinerja Nilai Kebebasan sipil jumlah anggaran sebesar Rp. 1.330.685.447,- dapat direalisasikan mencapai 93,06% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 90,12%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
24. Alokasi anggaran pencapaian sasaran meningkatkan Hak-hak politik dengan indicator kinerja Nilai hak-hak politik jumlah anggaran sebesar Rp. 108.378.750,- dapat direalisasikan mencapai 91,73% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 80,87 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **cukup efektif**.
25. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya peran lembaga demokrasi dengan indicator kinerja nilai kelembagaan demokrasi jumlah anggaran sebesar Rp. 4.344.907.306,- dapat direalisasikan mencapai 91,12% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 115,4%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
26. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya Kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dengan indicator kinerja indeks ketahanan daerah jumlah anggaran sebesar Rp. 7.201.290.898,- dapat direalisasikan mencapai 78,57% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 113%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.

27. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup dengan indicator kinerja indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) jumlah anggaran sebesar Rp. 6.557.951.585,- dapat direalisasikan mencapai 74,76% dengan hasil capaian kerjanya sebesar 95,12%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa secara umum pengalokasian anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 adalah efektif dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebanyak 12 indikator kinerja yang capaiannya **sangat efektif**;
- b. Sebanyak 9 indikator kinerja yang capaiannya **efektif**;
- c. Sebanyak 2 indikator kinerja yang capaiannya **cukup efektif** dan
- d. Sebanyak 4 indikator kinerja yang pengalokasian anggarannya **tidak efektif**.

## **Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021**

### **1. Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian**

#### - Analisis Capaian Kinerja

Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kuartal ke-3 tahun 2021 mencatat angka 6,71, dimana angka tersebut mengalami penurunan 1,07 (15,95%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang mencatat angka 7,78. Namun angka pencapaian ditahun 2021 tersebut telah melebihi target yang ditentukan pada tahun berjalan yaitu 5,97.

#### - Faktor yang mendukung target tercapai

Ketercapaian target di tahun 2021 dipicu oleh beberapa faktor, antara lain kondisi pembatasan sosial akibat pandemi covid-19 yang berkepanjangan sehingga menyebabkan peningkatan lapangan usaha dibidang pertanian. Hal tersebut berimbas kepada peningkatan tenaga kerja, jumlah lahan pertanian, serta peningkatan produksi komoditas pertanian di Bangka Belitung.

#### - Faktor yang menghambat target tidak tercapai

Terjadinya penurunan laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh beberapa Faktor, seperti menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), inflasi, serta meningkatnya pengeluaran pemerintah daerah.

#### - Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai

- Memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, alsintan, dll dalam rangka peningkatan produktivitas petani
- Melakukan pembinaan dan penyuluhan secara berkala kepada petani, baik pra panen maupun pasca panen
- Melakukan pengaturan sistem distribusi dan konsep pemasaran

- produk pertanian local
- Berkoordinasi dengan stakeholder untuk melancarkan penjualan hasil panen
  - Melakukan survei pasar untuk memantau, mengawasi, serta memperbaiki harga komoditas unggulan dan pangan lokal

## 2. **Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan**

- Analisis Capaian Kinerja  
Faktor terjadinya Pandemi Covid-19 yang memuncak di bulan Juni-Agustus cukup memberi dampak terhadap capaian kinerja dalam peningkatan PDRB sub sector Perikanan.
- Faktor yang mendukung target tercapai  
Pertumbuhan budidaya tambak vaname yang cukup pesat sehingga meningkatkan volume ekspor sector perikanan, disertai tetap tingginya konsumsi ikan di Bangka Belitung
- Faktor yang menghambat target tidak tercapai  
Kondisi pandemic Covi-19 membuat ekspor ikan agak terkendala baik itu ikan hidup (kerapu) beberapa buyer tidak melakuakn transaksi maupun ekspor ikan segar ke Malaysia dan Singapur sedikit dibatasi.
- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai
  - Segera mengusulkan Perda tentang budidaya vaname, agar kegiatan usaha budidaya sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat dan ekosistem disekitarnya.
  - Memperkuat kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dn Perikanan guna menjamin keberlangsungan kegiatan usaha sesuai aturan perundang-undangan.

## 3. **Laju Pertumbuhan kunjungan wisatawan (Pendekatan Tamu Hotel Bintang)**

- Analisis Capaian Kinerja  
Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan Provinsi Kep. Bangka Belitung mengalami kenaikan sebesar 48,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
- Faktor yang mendukung target tercapai  
Adanya penurunan pada kasus Pandemi Covid -19
- Faktor yang menghambat target tidak tercapai  
Kenaikan jumlah kasus pandemi Covid -19
- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai  
Melakukan Promosi pariwisata dan penyelenggaraan event pariwisata, melaksanakan program CHSE untuk industry pariwisata  
Jumlah tamu yang menginap pada hotel bintang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan November 2021 tercatat sebanyak 41.395 orang. Jumlah ini naik 22,70 persen dibandingkan

dengan jumlah tamu bulan sebelumnya yang mencapai 33.736 orang. Jumlah tamu Indonesia naik 22,77 persen namun jumlah tamu asing turun 66,67 persen. Tamu domestik lebih mendominasi jumlah tamu yang datang ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan tamu asing. Dari total 41.395 tamu, 99,97 persennya adalah tamu domestik.

Berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Kota Pangkalpinang menjadi daerah dengan kenaikan tamu hotel tertinggi. Wilayah ini tercatat mengalami kenaikan mencapai 43,70 persen. Seluruh wilayah mengalami peningkatan jumlah tamu hotel bintang. Pulau Belitung menjadi daerah dengan peningkatan terendah dengan catatan 5,55 persen saja.

Hotel bintang di Pulau Belitung memiliki jumlah tamu menginap terbanyak dibandingkan dengan daerah lainnya, yaitu sebanyak 15.851 orang. Jumlah tamu menginap terbanyak berikutnya terdapat di Kota Pangkalpinang sebanyak 11.699 orang, Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 8.249 orang, dan Kabupaten Bangka sebanyak 5.596 orang. Beberapa faktor yang mendorong kenaikan jumlah tamu yang datang adalah adanya event-event skala nasional yang terselenggara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode November 2021. (*Sumber : BPS*)

#### **4. Laju Pertumbuhan PDRB sector Pertambangan dan Energi**

- Analisis Capaian Kinerja

Realisasi Kinerja 2021 meningkat menjadi 6,93 pada triwulan III dari realisasi kinerja 2020 yang sangat rendah -9,23, hal ini dipengaruhi harga komoditas tambang yang tinggi pada tahun 2021

- Faktor yang mendukung target tercapai

Pencapaian kinerja tercapai didukung dengan iklim usaha pertambangan timah yang kondusif dan trend harga timah yang meningkat

- Faktor yang menghambat target tidak tercapai

Menurunnya harga komoditas timah

- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai

- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait kegiatan usaha pertambangan
- Penataan dokumen arsip pemegang IUP

#### **5. Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan**

- Analisis Capaian Kinerja

Terjadi laju peningkatan pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan sebesar 18,06%

- Faktor yang mendukung target tercapai  
Tingginya permintaan pasar global pasca pandemic covid-19 dan naiknya nilai barang komoditi ekspor, seperti timah, produk turunan sawit, lada, dan komoditi ekspor lainnya

## 6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

- Analisis Capaian Kinerja  
Pelatihan berbasis kompetensi dilakukan harus sesuai dgn kebutuhan dunia usaha dan dunia industri(DUDI), dan program kegiatan yang memberikan kesempatan kerja ditingkatkan seperti kegiatan pemagangan dalam negeri dan luar negeri serta pelatihan peningkatan produktivitas.
- Faktor yang mendukung target tercapai  
Memperluas kesempatan kerja. Kesempatan kerja dapat diperluas dengan dua cara, yaitu :
  - Pengembangan industri, terutama jenis industri yang bersifat padat karya (yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja)
  - Melalui berbagai proyek pekerjaan umum seperti pembangunan jalan, saluran air, bendungan dan jembatan
- Faktor yang menghambat target tidak tercapai
  - Perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat dampak COVID 19
  - Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja
  - Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja
  - kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perudahaan yang memiliki kekurangan tenaga kerja
  - kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan
- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai
  - Pemerintah harus lebih maksimal lagi dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan Softskill budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja
  - Pada dasarnya kebijakan untuk menekan tingkat pengangguran harus bertumpu pada peningkatan investasi di sektor riil, khususnya pada sektor pertanian dan sektor industry

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak

1.121,08 ribu orang, naik sebanyak 7,91 ribu orang dibanding Februari 2021 dan naik sebanyak 16,86 ribu orang jika dibanding Agustus 2020.

TPT hasil Sakernas Agustus 2021 sebesar 5,03 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5-6 orang penganggur. Pada Agustus 2021, TPT mengalami penurunan sebesar 0,01 persen poin dibandingkan Februari 2021 dan sebesar 0,22 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Pada Agustus 2021, TPT laki-laki sebesar 4,58 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,89 persen. TPT menurut jenis kelamin memiliki pola yang sama dengan pola nasional, yaitu mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020. Dibandingkan Agustus 2020, TPT laki-laki dan perempuan turun masing-masing sebesar 0,32 persen poin dan 0,01 persen poin. Dibandingkan Februari 2021, TPT laki-laki naik sebesar 0,22 persen poin, sedangkan TPT perempuan turun sebesar 0,36 persen poin

Pada Agustus 2021, TPT perkotaan (6,21 persen) lebih tinggi hampir dua kali TPT di daerah perdesaan (3,54 persen). Dibandingkan Agustus 2020, TPT perkotaan dan perdesaan turun masing-masing sebesar 0,16 persen poin dan 0,37 persen poin. Namun jika dibandingkan Februari 2021, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,90 persen poin dan TPT perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,96 persen poin.

TPT menurut kategori pendidikan mempunyai pola yang sama baik pada Agustus 2021, Februari 2021, dan Agustus 2020. Pada Agustus 2021, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 9,06 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 3,01 persen. Dibandingkan Agustus 2020, TPT pada 3 kategori pendidikan mengalami peningkatan antara lain tamatan SD ke Bawah (0,12 persen poin), SMP (0,49 persen poin), dan Universitas (0,15 persen poin). Jika dibandingkan Februari 2021 beberapa kategori pendidikan mengalami peningkatan. Peningkatan TPT terbesar adalah pada tamatan SMA yaitu sebesar 2,50 persen poin. (*sumber: BPS*)

## **7. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan**

### **- Analisis Capaian Kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang telah menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Daerah dikarenakan adanya dukungan anggaran baik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### **- Faktor yang mendukung target tercapai**

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan ini adalah dikarenakan adanya komitmen dan intensnya dan usaha Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan Bimbingan Teknis Penyusunan IPK bagi ASN di Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi/Kabupaten/Kota setiap Tahunnya dengan narasumber dari Pusat

- Faktor yang menghambat target tidak tercapai
  - Kesulitan dalam mencari data dan informasi dalam pengumpulan data
  - Kurangnya respon pihak yang terkait dalam pengumpulan data
- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai

Semua pihak yang terkait harus lebih responsif dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan supaya target dapat tercapai

## **8. Persentase Angka Kemiskinan**

- Analisis Capaian Kinerja

Terdapat realisasi persentase capaian sebesar 99,92 %, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100,00.%, maka target tahun 2021 telah tercapai. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun lalu sebesar 115,33 %, maka terdapat penurunan capaian kinerja sebesar -15,41 %. Hal tersebut disebabkan karena tingginya jumlah Rastra dan BPNT yang tersalur kepada Keluarga Miskin pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2021.
- Faktor yang mendukung target tercapai
  - Perekonomian yang cenderung semakin membaik dibandingkan dengan kondisi saat awal Pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk yang mendorong terjadinya penurunan angka kemiskinan;
  - Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Babel, rata-rata pengeluaran penduduk desil pertama (kelompok 10 persen ke bawah) di daerah perkotaan mengalami peningkatan pada periode September 2020-Maret 2021 yaitu sebesar Rp 708.552.
  - Distribusi pengeluaran pada 40 persen penduduk terbawah dan 20 persen penduduk teratas baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami kenaikan. Kenaikan distribusi pengeluaran untuk kelompok 40 persen penduduk terbawah di daerah perdesaan sebesar 1,40 persen;
  - Kondisi perekonomian Babel pada triwulan I 2021 tumbuh jika dibandingkan kondisi triwulan III-2020. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2021 terhadap triwulan III-2020 tumbuh sebesar 0,85 persen.

- Faktor yang menghambat target tidak tercapai
  - Ketersediaan database PMKS yang valid;
  - Lemahnya sinergitas dan sinkronisasi program antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka penanganan masalah social dan pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi lemah, setengah-setengah dan tidak efisien, sistem pencatatan dan pelaporan menjadi lambat, belum lengkap dan kurang akurat;
  - Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan masalah sosial, sedangkan kompleksitas, kuantitas dan kualitas permasalahan sosial cenderung meningkat;
  - Penanganan permasalahan sosial belum terfokus dan terintegrasi dengan komprehensif serta masih mengandalkan ego sektoral diantara stakeholders yang ada;
  - Keberlanjutan program strategis dan pola pembinaan lanjutan yang tidak terintegrasi dan terprogram dengan baik
- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai
  - Melakukan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data sektoral penerima bantuan dan data PMKS.
  - Pengelolaan DTKS, data penerima bantuan, dan data PMKS yang perlu dilakukan secara terintegrasi sehingga memperbesar inclusion dan exclusion error.
  - Memperbaiki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dan rentan.
  - Melalui program bantuan sosial dengan memberikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada masyarakat miskin, penyaluran bantuan non tunai melalui e-warong untuk Rumah Tangga Miskin, bantuan untuk penerima Program keluarga Harapan (PKH) dan bantuan premi BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja disektor informal dan anggota PKH;
  - Melalui program dan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Salah satunya dengan mengalokasikan dana bantuan, baik itu ke Kabupaten/Kota maupun langsung ke desa

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2008 hingga Maret 2021 berfluktuasi dari tahun ke tahun, tetapi menunjukkan tren yang menurun. Pada periode 2008 hingga Maret 2021 jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 13,99 ribu orang, yaitu dari 86,70 ribu orang pada tahun 2008 menjadi 72,71 ribu orang pada Maret 2021.

Pada Maret 2021, persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 4,90 persen, naik sebesar 0,01

point persen dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 4,89 persen.

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan

Selama periode September 2020–Maret 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,45 persen, yaitu dari Rp727.114,- per kapita per bulan pada September 2020 menjadi Rp752.203,- per kapita per bulan pada Maret 2021. Sementara pada periode Maret 2020–Maret 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,26 persen, yaitu dari Rp721.455,- per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp752.203,- per kapita per bulan pada Maret 2021.

Secara total, Garis Kemiskinan di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Pada Maret 2021, garis kemiskinan di daerah perkotaan sebesar Rp737.934,- per kapita per bulan sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp768.414,- per kapita per bulan. (*Sumber : BPS*)

## 9. Pendapatan Perkapita

### - Analisis Capaian Kinerja

Terdapat realisasi persentase capaian sebesar 100,00 %, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100,00.%, maka target tahun 2021 telah tercapai;

### - Faktor yang mendukung target tercapai

- Peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan;
- Peningkatan kemampuan masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan

### - Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai

- Meningkatkan Administrasi Pemerintahan Desa
- Meningkatkan kerjasama Desa
- Meningkatkan Kelembagaan desa yang berperan aktif dalam menciptakan lapangan pekerjaan

## 10. Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum yang menjadi sasaran RPJMD pada tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 67,43% belum dapat di capai secara optimal pada tahun 2021 disebabkan beberapa kendala, dan akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk pemenuhan infrastruktur pekerjaan umum dalam pelayanan kepada masyarakat.

- Faktor yang mendukung target tercapai
  1. Ketersediaan Anggaran
  2. Komitmen daerah
  3. Dukungan dari masyarakat
- Faktor yang menghambat target tidak tercapai  
Pandemi Covid 2019 yang menyebabkan refocussing anggaran
- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai  
Membuat rencana aksi untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2022 dan dapat dimasukkan ke dalam rencana strategis Dinas PUPR & PRKP

## **11. Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar**

- Analisis Capaian Kinerja  
'Capaian Tahun 2020 : Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak : 90,74% Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman : 78,28% Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan : 62,37%
- Faktor yang mendukung target tercapai  
Ketersediaan infrastruktur dasar yang menjadi sasaran RPJMD pada tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 25% antara lain ketersediaan infrastruktur air minum, sanitasi dan persampahan belum dapat di capai pada tahun 2021 disebabkan beberapa kendala, dan akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk pemenuhan infrastruktur dasar dalam pelayanan kepada masyarakat
- Faktor yang menghambat target tidak tercapai
  1. Ketersediaan Anggaran
  2. Komitmen daerah
  3. Dukungan dari masyarakat
- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai  
Membuat rencana aksi untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2022 dan dapat dimasukkan ke dalam rencana strategis Dinas PUPR & PRKP

## **12. Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan**

- Analisis Capaian Kinerja  
Presentase Capaian Kinerja Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan pada Tahun 2021 mencapai 82,28 %, hal ini disebabkan terdapat kendala seperti status aset Dermaga Pulau Seliu dan serta lahan dermaga di pulau Pongok yang belum dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Faktor yang mendukung target tercapai  
Perencanaan Yang Matang Serta Didukung Kelengkapan Readiness Criteria

- Faktor yang menghambat target tidak tercapai  
Refocusing Anggaran serta status aset Dermaga Pulau Seliu dan serta lahan dermaga di pulau Pongok yang belum dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai  
Mengupayakan Agar Program dan Kegiatan Menjadi Prioritas Pembangunan Daerah

### **13. Angka Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah laki-laki dan Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan).**

- Analisis Capaian Kinerja  
Realisasi kinerja tahun 2021 belum memenuhi target tetapi terjadi kenaikan angka HLS, yakni sebesar 0,12 poin
- Faktor yang mendukung target tercapai  
Faktor kenaikan anggaran dari DAK fisik dan non fisik, Dana Insentif Daerah, peningkatan layanan akses pendidikan melalui pemberian beasiswa, penambahan ruang kelas baru, pembangunan USB (unit Sekolah Baru), Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Faktor yang menghambat target tidak tercapai
  - Angka melanjutkan ke pendidikan menengah rendah
  - Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah cukup tinggi
- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai
  - Secara bertahap pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
  - Secara bertahap pemenuhan guru dan tenaga kependidikan

Selama periode 2010 hingga 2021, HLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah meningkat 1,69 tahun atau 1 tahun 8 bulan 8 hari, sementara RLS meningkat 1,01 tahun atau 1 tahun 4 hari. Secara rata-rata, Harapan Lama Sekolah tumbuh sebesar 1,37 persen per tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh sebesar 1,22 persen per tahun.

### **14. Persentase Sekolah Terakreditasi “A”**

- Analisis Capaian Kinerja  
94,9 % belum memenuhi Target angka penurunan Persentase Sekolah Terakreditasi A sebesar 6,3 poin
- Faktor yang menghambat target tidak tercapai
  - Tidak terpenuhinya 8 standar nasional pendidikan antara lain belum optimalnya fungsi pengawasan sekolah dan keterbatasan anggaran APBD
  - Terjadinya perubahan dalam sistem penilaian akreditasi (yang pada awalnya difasilitasi oleh badan akreditasi nasional dan dinilai

oleh asesori di daerah kemudian berubah menjadi sistem penilaian secara online yang dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan)

- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai
  - Secara bertahap untuk pemenuhan 8 standar nasional pendidikan
  - Meningkatkan fungsi pengawasan

## 15. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

### - Analisis Capaian Kinerja

Capaian IPA tahun 2021 adalah sebesar 65,82 dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 68,1. Terdapat selisih capaian yaitu -2,28 yang artinya target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai. Dan bila dibandingkan dengan tahun 2020 tidak ada selisih capaian karena nilai realisasi kinerja tahun 2021 diasumsikan sama dengan tahun 2020, hal ini karena data Indeks Perlindungan Anak tahun 2021 akan direlease oleh BPS pada bulan November tahun 2022.

### - Faktor yang mendukung target tercapai

Faktor yang mendukung pencapaian IPA adalah capaian nilai indeks pada pandemi I (hak sipil dan kebebasan), pandemi III (pandemic dasar dan kesejahteraan) dan pandemi IV (pandemic, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya).

Pada pandemi ini, nilai indeks mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Klaster I mengalami kenaikan nilai indeks sebesar 2,75. Klaster II mengalami kenaikan nilai indeks sebesar 2,27 dan pada pandemi IV nilai indeks mengalami kenaikan sebesar 2,30.

Rincian pandem pendukungnya sebagai berikut :

- Klaster I
  1. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran
  2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan /memanfaatkan taman bacaan masyarakat
  3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet
  4. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pandem kemasyarakatan di lingkungan sekitar
  5. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah
- Klaster III
  1. Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas pandemic dan ditolong oleh tenaga pandemic

2. Persentase balita stunting
3. Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya < 1.400 kkal
5. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
6. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
7. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok
8. Persentase anak berusia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
- Klaster IV
  1. Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah
  2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia
  3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar)
  4. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler
  5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni

- Faktor yang menghambat target tidak tercapai

Capaian target IPA tidak sesuai target dikarenakan ada penurunan nilai indeks di pandemi II (lingkungan pandemic dan pengasuhan alternatif) dan pandemi V (perlindungan khusus).

Faktor penghambat tercapainya target yang direncanakan pada pandemi II dan V sebagai berikut :

Faktor pandem yang mempengaruhi pada pandemi II adalah :

1. Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun (perkawinan usia anak)
2. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak
3. Persentase Anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal pandemi kedua orang tua
4. Persentase Angka kesiapan sekolah

Dari data perkawinan usia anak diketahui bahwa pada tahun 2021 berdasarkan data yang dikeluarkan BPS Angka Perkawinan Anak di Bangka Belitung tertinggi di Indonesia yaitu dengan nilai 18,76 sementara angka rata-rata nasional adalah 10,35

Faktor yang mempengaruhi pada pandemi V adalah :

1. Persentase Anak berusia 10-17 tahun yang bekerja

2. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/ non disabilitas) yang pernah mengakses internet
3. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas)
4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan
5. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang terlantar

Data pandemi V ini menunjukkan penurunan indeks yang cukup tajam dari sebelumnya 80,11 menjadi 67,59. Terjadi penurunan nilai indeks sebesar 12,52

- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai
  1. Menurunkan angka usia perkawinan anak yang pada saat ini Bangka Belitung merupakan provinsi dengan angka usia perkawinan anak tertinggi.
  2. Mengurangi Balita yang mendapatkan pengasuhan yang tidak layak
  3. Meningkatkan angka kesiapan sekolah
  4. Mengurangi pekerja anak
  5. Mengurangi dampak pandemic dari akses internet pada anak
  6. Meningkatkan angka partisipasi sekolah
  7. Mengurangi kemiskinan
  8. Mengurangi anak yang terlantar

## **16. Laju Pertumbuhan Penduduk**

- Analisis Capaian Kinerja  
Berdasarkan data dukcapil prov. Kep. Babel, Laju Pertumbuhan Penduduk provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 1,8%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2020 sebesar 1,84%) angka ini sudah mengalami penurunan sebesar 0,07%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 (sebesar 2,08), capaian LPP tahun 2021 telah melampaui target dengan selisih 0,24%. Dapat disimpulkan bahwa target Laju pertumbuhan penduduk dalam RPJMD tercapai.
- Faktor yang mendukung target tercapai  
Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh Kelahiran, Kematian dan Migrasi.  
Adanya penurunan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 antara lain dipengaruhi :
  1. Angka kelahiran total (TFR) Bangka Belitung cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir dan pada tahun 2020-2022 cenderung tetap sebesar 2,3.
  2. Pemakaian alat kontrasepsi modern tahun 2021 mengalami peningkatan disbanding tahun 2020

3. Pandemi Covid 19 dalam 2 tahun terakhir ini mempengaruhi rendahnya arus migrasi di Bangka Belitung
- Faktor yang menghambat target tidak tercapai  
Meskipun target RPJMD tercapai, masih ada faktor lain yang bersifat menghambat dan masih menjadi pekerjaan rumah urusan PPKB dalam pencapaian target RPJMD ini antara lain :
    1. Masih tingginya angka perkawinan anak di Bangka Belitung yang juga berkontribusi pada angka ASFR 15-19 th (angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun)
    2. Unmetneed (Pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber-KB) masih cukup tinggi di Bangka Belitung (tahun 2020 sebesar 9,04%).

## 17. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

- Analisis Capaian Kinerja  
Kinerja tahun 2021 meningkat karena semua indikator meningkat dari tahun sebelumnya.
- Faktor yang mendukung target tercapai  
Adalah komponen pengeluaran per kapita dimana capaian Bangka Belitung tahun 2021 diatas rata-rata nasional (12.819:11.156)
- Faktor yang menghambat target tidak tercapai
  - Umur harapan hidup dimana capaian Bangka Belitung tahun 2021 dibawah rata-rata nasional (70,73:71,57)
  - Rata-rata lama sekolah dimana capaian Bangka Belitung tahun 2021 dibawah rata-rata nasional (8,08:8,54)
  - Harapan lama sekolah dimana capaian Bangka Belitung tahun 2021 dibawah rata-rata nasional (12,17:13,08)
- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai
  - mendorong Dinas kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit melalui peningkatan sarana dan prasarana. Khususnya untuk jaminan persalinan.
  - meningkatkan sosialisasi pencegahan perwakinan dini yang berdampak terhadap meningkatnya kematian ibu dan bayi serta stunting.
  - meningkatkan lapangan kerja bagi lulusan sarjana di Bangka Belitung guna meningkatkan rata-rata lama sekolah. Karena yang diukur adalah rata-rata lama penduduk usia 25 tahun ke atas menempuh pendidikan. Banyak sarjana asal Bangka Belitung yang tidak kembali ke daerah karena kecilnya peluang lapangan kerja bagi lulusan sarjana sehingga tidak terhitung saat pengukuran IPM.

- mendorong dinas pendidikan untuk meningkatkan sosialisasi minat belajar di sejak dini di PAUD, sosialisasi wajib belajar 12 tahun, pengadaan taman baca, dan kegiatan bimbingan belajar, dll.
- advokasi pemahaman ke masyarakat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama terhadap akses pendidikan dan kesehatan.
- mensukseskan dan mendukung penerapan model Desa ramah perempuan dan peduli anak pada 6 desa model di pulau bangka sebagai percontohan untuk desa lain di masa depan.
- meningkatkan jumlah lokus Sekolah Perempuan “Sekuntum Melati” terkait peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan

### **18. Indeks Pembangunan Pemuda**

- Analisis Capaian Kinerja  
Meningkatnya pemuda yang memiliki keterampilan dan berwirausaha
- Faktor yang mendukung target tercapai  
Masihnya kurangnya keaktifan pemuda dalam organisasi dan proporsi pemuda yang memberi saran/pendapat dalam rapat dikarenakan kurangnya pengalaman dalam kemampuan teknik, memvisualisasikan usaha, mengkoordinasikan, dan mengelola SDM
- Faktor yang menghambat target tidak tercapai  
Melakukan pengembangan organisasi kepemudaan dan melakukan koordinasi ke instansi yang terkait dalam mendukung nilai IPP

### **19. Indeks Pembangunan Olahraga**

- Analisis Capaian Kinerja  
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga
- Faktor yang mendukung target tercapai  
Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka dan sarana prasarana olahraga
- Faktor yang menghambat target tidak tercapai  
Masih kurangnya SDM keolahragaan yang memiliki sertifikasi
- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai  
Melakukan pelatihan sertifikasi tenaga keolahragaan untuk peningkatan SDM keolahragaan

### **20. Persentase PMKS Sejahtera**

- Analisis Capaian Kinerja
  - Terdapat realisasi persentase capaian sebesar 92,22 %, dengan

demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100,00.%, maka target tahun 2021 telah tercapai;

- Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun lalu sebesar 106,15 %, maka terdapat penurunan capaian kinerja sebesar - 13,93 %. Hal tersebut disebabkan karena terdapat over realisasi pada Jumlah klien/warga binaan sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di Panti Sosial Bina Serumpun dan jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di luar panti pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2021.
- Faktor yang mendukung target tercapai
  - Adanya UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  - Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial;
  - Adanya dana sosial dari dunia usaha (CSR) yang belum dimanfaatkan secara optimal;
  - Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang relatif stabil;
  - Adanya kerja sama lintas sektoral;
  - Terbitnya Perda Tentang CSR
- Faktor yang menghambat target tidak tercapai
  - Ketersediaan database PMKS yang valid;
  - Lemahnya sinergitas dan sinkronisasi program antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka penanganan masalah social dan pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi lemah, setengah-setengah dan tidak efisien, sistem pencatatan dan pelaporan menjadi lambat, belum lengkap dan kurang akurat;
  - Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan masalah sosial, sedangkan kompleksitas, kuantitas dan kualitas permasalahan sosial cenderung meningkat;
  - Penanganan permasalahan sosial belum terfokus dan terintegrasi dengan komprehensif serta masih mengandalkan ego sektoral diantara stakeholders yang ada;
  - Keberlanjutan program strategis dan pola pembinaan lanjutan yang tidak terintegrasi dan terprogram dengan baik
- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai
  - Melakukan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data sektoral penerima bantuan dan data PMKS.
  - Pengelolaan DTKS, data penerima bantuan, dan data PMKS yang perlu dilakukan secara terintegrasi sehingga memperbesar inclusion dan exclusion error.

- Memperbaiki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dan rentan.
- Kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang harus diseragamkan dan terstandar.
- Pemenuhan infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Optimalisasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dan rentan, baik dari sisi kesempatan berusaha maupun kemampuan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
- optimalisasi sertifikasi terhadap SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan akreditasi terhadap lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

## 21. Angka Kesehatan Masyarakat

- Analisis Capaian Kinerja  
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran melalui upaya Pembinaan, Pendampingan secara intensif terkait program kesehatan masyarakat, program pencegahan pengendalian penyakit, program sediaan farmasi, dan alat kesehatan, serta program pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Serta adanya dukungan Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai
  - Koordinasi lintas program dan lintas sektor, Organisasi Profesi khususnya profesi kesehatan, Perguruan Tinggi, LSM dan mitra terkait lainnya dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi serta stunting
  - Meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan
  - Mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes baik fasyankes pemerintah maupun swasta dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi
  - Audit Maternal Perinatal Terintegrasi dalam Surveilans Kematian Ibu dan optimalisasi penggunaan aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN)
  - Mengoptimalkan peran dokter dalam antenatal care (ANC)
  - Optimalisasi penerapan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) pada bayi muda usia kurang dari 2 bulan, dan usia 2 bulan sampai dengan 5 tahun.
  - Meningkatkan pelayanan gizi ibu hamil dengan melakukan

- pemeriksaan antropometri ibu hamil
- Merujuk anak yang tidak naik dua kali berat badannya, menangani anak dengan gizi buruk yang dirujuk dan diberikan PMT
  - Penanganan ibu hamil KEK melalui pemberian makanan tambahan (PMT)
  - Meningkatkan pelayanan bagi anak balita di Posyandu dengan melakukan pengukuran rutin status gizi anak balita

## **22. Indeks Reformasi Birokrasi**

### Faktor yang menghambat target tidak tercapai

1. Perubahan LKE dari 2.5 Menjadi LKE 4.0 sehingga perubahan Komponen penilaian khususnya pada komponen Pengungkit, yang semula fokus hanya capaian Pemenuhan 8 area perubahan namun pada Tahun 2021 Komponen Pengungkit terdiri dari
  - a) Pemenuhan 8 Area perubahan
  - b) Hasil Antara Area Perubahan
  - c) Reform
2. TIM RBI belum berperan optimal  
TIM RBU belum mempunyai kesiapan yang cukup kuat dalam menghadapi perubahan.

### Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai

1. Mengoptimalkan Peran Tim RBI melalui koordinasi
2. Meningkatkan Peran Agen Perubahan dalam penerapan Budaya Kerja
3. Integrasi E-SAKIP
4. Manajemen pegawai dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja  
Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan menindaklanjuti hasil monev

## **23. Nilai Kebebasan Sipil**

- Analisis Capaian Kinerja  
Penurunan Aspek Kebebasan Sipil disebabkan Oleh Berkurangnya Kejadian Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Pemerintah Terkait Kebebasan Berkumpul dan Berserikat serta Berkurangnya Kejadian Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan Oleh Pemerintah dan Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat.
- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai
  - Melakukan Sosialisasi Undang-undang HAM dan Undang-Undang terkait lainnya.

## **24. Nilai Hak-Hak Politik**

- Analisis Capaian Kinerja

- Penurunan Aspek Hak-Hak Politik terutama disebabkan Oleh
- Menurunnya Persentase Anggota Perempuan di DPRD, Meningkatnya
- Jumlah Demonstran yang Bersifat Kekerasan, dan Menurunnya Jumlah
- Pengaduan Masyarakat Mengenai Penyelenggaraan Pemerintah
- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai
  - Melakukan Pelatihan kapasitas dan peran kelompok masyarakat dalam politik
  - Lokakarya tentang pembangunan politik yang berbasis gender
  - Dialog publik tentang partisipasi masyarakat dalam politik
  - Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

## 25. Nilai Kelembagaan Demokrasi (Kesbangpol)

- Analisis Capaian Kinerja  
Adanya trend negatif yang di peroleh variabel kebebasan berpendapat menjadi isu yang paling menarik pada aspek kebebasan sipil. Penurunan angka yang terjadi pada beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kondisi yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu prinsip demokrasi untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam menyampaikan hak bersuara, baik kritik maupun saran kepada pemerintah.
- Faktor yang menghambat target tidak tercapai  
Penurunan Aspek Kebebasan Sipil disebabkan Oleh Berkurangnya Kejadian Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Pemerintah Terkait Kebebasan Berkumpul dan Berserikat serta Berkurangnya Kejadian Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan Oleh Pemerintah dan Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat.
- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai  
Dengan melakukan Sosialisasi Undang-undang HAM dan Undang-Undang terkait lainnya.

## 26. Indeks Ketahanan Daerah (BPBD)

- Analisis Capaian Kinerja  
Target sasaran kinerja Indeks Ketahanan Bencana pada tahun 2021 sebesar 0,30 terealisasi sebesar 0,34 dengan rata-rata capaian 113,13%. Indeks Ketahanan dihitung berdasarkan indikator dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)* disepakati oleh 187 negara terdiri dari 7 Prioritas pengurangan risiko bencana.

Pencapaian prioritas-prioritas pengurangan risiko bencana ini diukur dengan 71 indikator pencapaian.

Hasil dari perhitungan 7 prioritas adalah :

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan, dengan indeks prioritas 0,72 ;
2. Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu, dengan nilai indeks 0,60;
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik :
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, dengan nilai indeks 0,30;
5. Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dengan nilai indeks 0,42;
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, dengan nilai indeks 0,23 ;
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dengan nilai indeks 0,20.

Dari penilaian 7 prioritas tersebut didapatkan Nilai Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,35. Capaian target sasaran atau peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah didukung oleh pencapaian target indikator program yang diampu oleh BPBD sebagai berikut

1. Persentase Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota yang diintervensi dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana ;
2. Persentase Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota yang diintervensi Dalam Kedaruratan Penanggulangan Bencana (PB);
3. Persentase Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota Yang di Rehabilitasi Dan di Rekonstruksi

- Faktor yang mendukung target tercapai

1. Telah dilakukan pengenalan dan sosialisasi awal Kapasitas Bencana kepada aparaturnya Pemerintah Kabupaten/Kota penyelenggara Penanggulangan Bencana (PB) walaupun belum maksimal
2. Perangkat Daerah penyelenggara PB telah memainkan perannya dalam Kebencanaan walaupun belum maksimal
3. Melibatkan *multistakeholders* dalam memecahkan permasalahan terkait kebencanaan
1. Kepedulian dan Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kebencanaan meningkat khususnya Perangkat Daerah
2. Keterlibatan DPRD dalam mendukung program-program Pemerintah Daerah

3. Mulai terjalin koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan PB di tingkat Daerah.
- Faktor yang menghambat target tidak tercapai
    1. Belum tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan rencana kontijensi sebagai acuan penyelenggaraan penanggulangan bencana
    2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana yang memadai
    3. Belum optimalnya koordinasi dan pembagian peran antar multistakeholders terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana.
    4. Masih banyaknya permasalahan yang berpotensi menimbulkan bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai
    1. Menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan rencana kontijensi
    2. Pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    3. Melakukan koordinasi dan harmonisasi intensif baik secara internal BPBD maupun eksternal dengan multistakeholders lainnya.
    4. Melakukan pemutakhiran kajian rawan bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahun

## **27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

- Faktor yang mendukung target tercapai
  1. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  2. Kegiatan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
  3. Pemantauan Kualitas Lingkungan Kegiatan Proper
- Faktor yang menghambat target tidak tercapai
  1. Aktivitas Penambangan Ilegal
  2. Refocussing anggaran tahun 2021 sehingga kegiatan pemulihan kualitas lingkungan tidak tercapai
- Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai  
Meningkatkan tutupan lahan melalui kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan dan lahan, serta mencegah kegiatan pembukaan/perusakan hutan dan lahan;

### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi :

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
  - a) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - c) UU Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021;
  - d) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  - e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  - f) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelimpahan dalam Rangka Tugas Pembantuan terhadap lingkup urusan Pemerintah Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas Pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan Pemerintahan Pusat atau Pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan pemerintahan tersebut terpilah menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah dengan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur

pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparaturnya daerah.

### 3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura sebanyak 6 Unit
- b. Tersedianya Prasarana Pengolahan Hortikultura sebanyak 2 Unit
- c. Tersedianya Kawasan Sayuran Lain 20 Unit
- d. Tersedianya Kawasan Bawang Merah 15 Ha
- e. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 2 Layanan
- f. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 1 kegiatan
- g. Tersedianya Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan 2 Layanan
- h. Tersedianya Sarana Pascapanen Tanaman Pangan dan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 3 unit
- i. Terlaksananya Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (PEN) 1 Kegiatan
- j. Tersedianya Kawasan Ubi Kayu 1500 Unit
- k. Terlaksananya Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (PEN) 1 Kegiatan
- l. Tersedianya Kawasan Padi (PEN) 4750 Unit
- m. Terlaksananya Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (PEN) 1 Kegiatan
- n. Tersedianya Benih oleh penangkar/produsen yang dihasilkan 100 Unit
- o. Tersedianya Area penyaluran benih padi dan Jagung 7.095 Unit
- p. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Kerjasama serta Layanan Keuangan 24 Layanan
- q. Terlaksananya Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Layanan Data dan Rekomendasi 24 Laporan
- r. Tersedianya Kawasan Jambu Mete (PEN) 100 Ha
- s. Tersedianya Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan 125 Unit
- t. Tersedianya Kawasan Lada 325 Unit
- u. Terlaksananya Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan 50 Produk
- v. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 3 Kegiatan
- w. Tersedianya Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN) 2 Unit

- x. Tersedianya Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN) 2 Unit
- y. Terlaksananya Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan 4 Rekomendasi Kebijakan
- z. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 2 Kegiatan
- aa. Tersedianya Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 28 Unit
- bb. Terlaksananya Layanan Manajemen Satker Daerah. 1 Layanan
- cc. Terpenuhinya Mutu dan Keamanan Pakan 10 Produk
- dd. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan 2 Layanan
- ee. Terlaksananya Optimalisasi Reproduksi 1.000 Kelompok Masyarakat
- ff. Terlaksananya Optimalisasi Reproduksi (PEN) 200 Kelompok Masyarakat
- gg. Terlaksananya Sertifikasi Unit Usaha 2 Lembaga
- hh. Terlaksananya Sertifikasi Unit Usaha (PEN) 1 Lembaga
- ii. Terlaksananya Masyarakat yang Teredukasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan 50 Orang
- jj. Terpenuhinya Mutu dan Keamanan Produk Hewan 50 Produk
- kk. Terlaksananya Layanan Perencanaan, Perbendaharaan Internal, dan Pengelolaan Barang Milik Negara 1 Layanan
- ll. Terlaksananya Layanan Data dan Informasi 1 Layanan
- mm. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Laporan
- nn. Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 1 Lembaga
- oo. Terpenuhinya Rasio pemenuhan lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi pertanian 24 Unit
- pp. Terlaksananya Optimasi Lahan 40 Km<sup>2</sup>
- qq. Terlaksananya Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin
- rr. Terlaksananya e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi 7 Layanan
- ss. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan
- tt. Terlaksananya Preservasi Jalan dan Jembatan dalam Kota Pangkalpinang-Namang 44.4 Km
- uu. Terlaksananya Preservasi Jalan dan Jembatan dalam Kota Pangkalpinang-Namang 44.4 Km
- vv. Terlaksananya Preservasi Jalan dan Jembatan dalam Kota Pangkalpinang-Namang 3.17 Km
- ww. Terlaksananya Revitalisasi Saluran Drainase Padat Karya Ruas Jalan Dalam Kota Pangkalpinang - Namang (Tambahan Padat Karya) 4.58 Km
- xx. Terlaksananya Preservasi Rutin Jembatan Pangkalpinang-Namang 141.9 Meter

- yy. Terlaksananya Sistem Pelaporan Elektronik Kementerian PU 1 Layanan
- zz. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 1 Layanan
- aaa. Terlaksananya Pelayanan Umum Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan 1 Layanan
- bbb. Terpenuhinya Kebutuhan Pencegahan COVID -19 1 Layanan
- ccc. Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan BMN 1 Layanan
- ddd. Terlaksananya Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi 27 Orang
- eee. Terlaksananya Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional 1 Unit
- fff. Tersedianya SAB yang Dibangun dan Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional 1 Unit
- ggg. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I. 1 Layanan

### 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi.

Tugas Pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.670.491.000,00,- dengan realisasi Rp. 54.684.915.350,00,- atau 87,26%.

#### 3.1.1. Target Kinerja

##### 1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura 6 Unit 2. Prasarana Pengolahan Hortikultura 2 Unit 3. Kawasan Sayuran Lain 20 Unit 4. Kawasan Bawang Merah 15 Ha 5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 2 Layanan	977.500.000,00

2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 1 kegiatan</li> <li>2. Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan 2 Layanan</li> <li>3. Sarana Pascapanen Tanaman Pangan dan</li> <li>4. Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 3 unit</li> </ol>	601.840.000,00
3	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (PEN) 1 Kegiatan</li> <li>2. Kawasan Ubi Kayu 1500 Unit</li> <li>3. Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (PEN) 1 Kegiatan</li> <li>4. Kawasan Padi (PEN) 4750 Unit</li> <li>5. Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (PEN) 1 Kegiatan</li> <li>6. Benih oleh penangkar/produsen yang dihasilkan 100 Unit</li> <li>7. Area penyaluran benih padi dan Jagung 7.095 Unit</li> </ol>	11.440.600.000,00
4	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan Perencanaan dan Kerjasama seta Layanan Keuangan 24 Layanan</li> <li>2. Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Layanan Data dan Rekomendasi 24 Laporan</li> </ol>	711.957.000,00
5	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Jambu Mete (PEN) 100 Ha</li> <li>2. Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan 125 Unit</li> <li>3. Kawasan Lada 325 Unit. (4) Standarisasi Mutu Hasil</li> </ol>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkebunan 50 Produk</li> <li>4. Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan 50 Produk</li> <li>5. Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 3 Kegiatan</li> <li>6. Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN) 2 Unit</li> <li>7. Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN) 2 Unit</li> <li>8. Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan 4 Rekomendasi Kebijakan</li> <li>9. Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 2 Kegiatan</li> <li>10. Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 28 Unit</li> </ul>	8.302.321.000,00
6	Program Dukungan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan Manajemen Satker Daerah 1 Layanan</li> </ul>	275.240.000,00
7	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu dan Keamanan Pakan 10 Produk</li> <li>2. Pelayanan Kesehatan Hewan 2 Layanan</li> <li>3. Optimalisasi Reproduksi 1.000 Kelompok Masyarakat</li> <li>4. Optimalisasi Reproduksi (PEN) 200 Kelompok Masyarakat</li> <li>5. Sertifikasi Unit Usaha 2 Lembaga</li> <li>6. Sertifikasi Unit Usaha (PEN) 1 Lembaga</li> <li>7. Masyarakat yang Teredukasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan 50 Orang</li> <li>8. Mutu dan Keamanan Produk Hewan 50 Produk</li> <li>9. Layanan Perencanaan, Perbendaharaan Internal, dan Pengelolaan Barang Milik Negara 1 Layanan</li> <li>10. Layanan Data dan Informasi 1 Layanan</li> <li>11. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Laporan</li> </ul>	1.197.868.000,00

		12. Fasilitas dan Pembinaan Lembaga 1 Lebaga	
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio pemenuhan lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi pertanian 24 Unit</li> <li>2. Optimasi Lahan 40 Km2</li> <li>3. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian 1 Kegiatan</li> <li>4. e-RDCK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi 7 Layanan</li> </ol>	24.442.685.000,00
9	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan</li> </ol>	792.520.000,00

2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Infrastruktur Konektivitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preservasi Jalan dan Jembatan dalam Kota Pangkalpinang-Namang 44.4 Km</li> <li>2. Preservasi Jalan dan Jembatan dalam Kota Pangkalpinang-Namang 44.4 Km</li> <li>3. Preservasi Jalan dan Jembatan dalam Kota Pangkalpinang-Namang 3.17 Km</li> <li>4. Revitalisasi Saluran Drainase Padat Karya Ruas Jalan Dalam Kota Pangkalpinang - Namang (Tambahkan Padat Karya) 4.58 Km</li> <li>5. Preservasi Rutin Jembatan Pangkalpinang-Namang 141.9 Meter</li> </ol>	12.884.547.000,00

2	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Pelaporan Elektronik Kementerian PU 1 Layanan</li> <li>2. Monitoring dan Evaluasi 1 Layanan</li> <li>3. Pelayanan Umum Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan 1 Layanan</li> <li>4. Kebutuhan Pencegahan COVID - 19 1 Layanan</li> <li>5. Penyusunan Laporan Keuangan BMN 1 Layanan</li> </ol>	693.162.000,00
---	----------------------------	--	----------------

3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi 27 Orang</li> <li>2. Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional 1 Unit</li> <li>3. SAB yang Dibangun dan Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional 1 Unit</li> </ol>	213.088.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I. 1 Layanan	137.163.000,00

### 3.1.2. Realisasi

#### 1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Reaisasi Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura sebanyak 6 Unit</li><li>2. Tersedianya Prasarana Pengolahan Hortikultura sebanyak 2 Unit</li><li>3. Tersedianya Kawasan Sayuran Lain 20 Unit</li><li>4. Tersedianya Kawasan Bawang Merah 15 Ha</li><li>5. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 2 Layanan</li></ol>	954.254.750,00
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 1 kegiatan</li><li>2. Tersedianya Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan 2 Layanan</li><li>3. Tersedianya Sarana Pascapanen Tanaman Pangan dan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 3 unit.</li></ol>	594.256.816,00

3	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (PEN) 1 Kegiatan.</li> <li>2. Tersedianya Kawasan Ubi Kayu 1500 Unit</li> <li>3. Terlaksananya Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (PEN) 1 Kegiatan</li> <li>4. Tersedianya Kawasan Padi (PEN) 4750 Unit</li> <li>5. Terlaksananya Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (PEN) 1 Kegiatan</li> <li>6. Tersedianya Benih oleh penangkar/produsen yang dihasilkan 100 Unit</li> <li>7. Tersedianya Area penyaluran benih padi dan Jagung 7.095 Unit</li> </ol>	9.446.071.740,00
4	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Kerjasama seta Layanan Keuangan 24 Layanan</li> <li>2. Terlaksananya Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Layanan Data dan Rekomendasi 24 Laporan</li> </ol>	695.380.920,00
5	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kawasan Jambu Mete (PEN) 100 Ha.</li> <li>2. Tersedianya Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)Tanaman Perkebunan 125 Unit</li> <li>3. Tersedianya Kawasan Lada 325 Unit</li> <li>4. Terlaksananya Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan 50 Produk</li> <li>5. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 3 Kegiatan</li> <li>6. Tersedianya Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN) 2 Unit</li> <li>7. Tersedianya Prasarana Pengolahan Tanaman</li> </ol>	8.234.826.568,00

		<p>Perkebunan (PEN) 2 Unit</p> <p>8. Terlaksananya Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan 4 Rekomendasi Kebijakan</p> <p>9. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 2 Kegiatan</p> <p>10. Tersedianya Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 28 Unit</p>	
6	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Manajemen Satker Daerah. 1 Layanan	270.450.824,00
7	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<p>1. Terpenuhinya Mutu dan Keamanan Pakan 10 Produk</p> <p>2. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan 2 Layanan</p> <p>3. Terlaksananya Optimalisasi Reproduksi 1.000 Kelompok Masyarakat</p> <p>4. Terlaksananya Optimalisasi Reproduksi (PEN) 200 Kelompok Masyarakat</p> <p>5. Terlaksananya Sertifikasi Unit Usaha 2 Lembaga</p> <p>6. Terlaksananya Sertifikasi Unit Usaha (PEN) 1 Lembaga</p> <p>7. Terlaksananya Masyarakat yang Teredukasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan 50 Orang</p> <p>8. Terpenuhinya Mutu dan Keamanan Produk Hewan 50 Produk</p> <p>9. Terlaksananya Layanan Perencanaan, Perbendaharaan Internal, dan Pengelolaan Barang Milik Negara 1 Layanan</p> <p>10. Terlaksananya Layanan Data dan Informasi 1 Layanan</p> <p>11. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Laporan</p> <p>12. Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 1 Lembaga</p>	1.183.469.496,00

8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya Rasio pemenuhan lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi pertanian 24 Unit</li> <li>2. Terlaksananya Optimasi Lahan 40 Km<sup>2</sup></li> <li>3. Terlaksananya Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian 1 Kegiatan</li> <li>4. Terlaksananya e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi 7 Layanan</li> </ol>	18.636.800.284,00
9	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan</li> </ol>	790.617.952,00

2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Infrastruktur Konektivitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Preservasi Jalan dan Jembatan dalam Kota Pangkalpinang-Namang 44.4 Km</li> <li>2. Terlaksananya Preservasi Jalan dan Jembatan dalam Kota Pangkalpinang-Namang 44.4 Km</li> <li>3. Terlaksananya Preservasi Jalan dan Jembatan dalam Kota Pangkalpinang-Namang 3.17 Km</li> <li>4. Terlaksananya Revitalisasi Saluran Drainase Padat Karya Ruas Jalan Dalam Kota Pangkalpinang - Namang (Tambahkan Padat Karya) 4.58 Km</li> <li>5. Terlaksananya Preservasi Rutin Jembatan Pangkalpinang-Namang 141.9 Meter</li> </ol>	12.884.547.000,00

2	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Sistem Pelaporan Elektronik Kementerian PU 1 Layanan</li> <li>2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 1 (Layanan)</li> <li>3. Terlaksananya Pelayanan Umum Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan 1 Layanan</li> <li>4. Terpenuhinya Kebutuhan Pencegahan COVID - 19 1 Layanan</li> <li>5. Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan BMN 1 Layanan</li> </ol>	647.397.000,00
---	----------------------------	---	----------------

2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Reaisasi Anggaran (Rp)
1	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi 27 Orang</li> <li>2. Terlaksananya Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional 1 Unit</li> <li>3. Tersedianya SAB yang Dibangun dan Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional 1 Unit</li> </ol>	212.460.600,00
2	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I. 1 Layanan</li> </ol>	134.381.400,00

Tabel 3.1  
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan  
Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	977.500.000,00	954.254.750,00	97,62	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, serta Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	100	APBN TH. 2021
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	620.000.000,00	607.662.000,00	98,01	Meningkatnya akses pasar hortikultura, dan Meningkatnya nilai tambah produk hortikultura, serta Meningkatnya Persentase	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									penurunan volume impor produk hortikultura		
		3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021	1. Output : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	320.000.000,00	313.632.000,00	98,01	6 Unit	100	APBN TH. 2021
			2. Output : Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Prasarana Pengolahan Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	300.000.000,00	294.030.000,00	98,01	2 Unit	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						
			2. Kegiatan : Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	267.500.000,00	257.789.750,00	96,37	Meningkatnya Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	100	APBN TH. 2021
			1. Output : Sarana Pengembang an Kawasan (Sayuran lain)								
			1. Rincian Kegiatan : Kawasan Sayuran Lain	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	150.000.000,00	144.555.000,00	96,37	20 Unit	100	APBN TH. 2021
			2. Output : Sarana Pengembang anKawasan (Bawang Merah)								

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Kawasan Bawang Merah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	117.500.000,00	113.234.750,00	96,37	15 Ha	100	APBN TH. 2021
			<b>3. Kegiatan : Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura</b>	<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>88.803.000,00</b>	<b>98,67</b>	<b>Meningkatnya Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura</b>	<b>100</b>	<b>APBN TH. 2021</b>
			<b>1. Output : Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90.000.000,00	88.803.000,00	98,67	2 Layanan	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	601.840.000,00	594.256.816,00	98,74	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	99	APBN TH. 2021
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	601.840.000,00	594.256.816,00	98,74	Meningkatnya Ekspor Produk Pangan Segar Tanaman Pangan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya	99	APBN TH. 2021
		3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021	1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	213.200.000,00	210.513.680,00	98,74	1 Kegiatan	98	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<b>2. Output : Data dan Informasi Publik</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	29.400.000,00	29.029.560,00	98,74	2 Layanan	100	APBN TH. 2021
			<b>3. Output : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Sarana Pascapanen Tanaman Pangan dan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	359.240.000,00	354.713.576,00	98,74	3 Unit	99	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Ketersediaan, Akses danKonsumsi Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian danKetahan an PanganProv insi Kepulauan Bangka Belitung	11.440.600.000,00	9.446.071.740,00	82,57	Terwujudnya Pengelolaan Produksi AnekaKacang dan Umbi, Tanaman Serealia , serta Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	89	APBN TH. 2021
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.470.000.000,00	1.663.171.000,00	47,93	Meningkatnya Jumlah Produksi Aneka Kacang, Aneka Umbi, dan Kedelai	73	APBN TH. 2021
		3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021	1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimbingan Teknis,	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	320.000.000,00	153.376.000,00	47,93	1 Kegiatan	99	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Monitoring dan Evaluasi (PEN)		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						
			<b>2. Output : Sarana Pengembang an Kawasan</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Kawasan Ubi Kayu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.150.000.000,00	1.509.795.000,00	47,93	1500 Unit	47	APBN TH. 2021
			<b>2. Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan</b>	<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>4.880.000.000,00</b>	<b>4.776.056.000,00</b>	<b>97,87</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan</b>	<b>96</b>	<b>APBN TH. 2021</b>

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<b>1. Output : Koordinasi</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	415.000.000,00	406.160.500,00	97,87	1 Kegiatan	94	APBN TH. 2021
			<b>2. Output : Sarana Pengembang an Kawasan</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Kawasan Padi (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.465.000.000,00	4.369.895.500,00	97,87	4750 Unit	98	APBN TH. 2021
			<b>3. Kegiatan : Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan</b>	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan	<b>3.090.600.000,00</b>	<b>3.006.844.740,00</b>	<b>97,29</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan</b>	<b>97</b>	<b>APBN TH. 2021</b>

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Bangka Belitung						
			<b>1. Output : Koordinasi</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	290.600.000,00	282.724.740,00	97,29	1 Kegiatan	95	APBN TH. 2021
			<b>2. Output : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Benih oleh penangkar/pro dusen yang dihasilkan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian danKetahan an PanganProvi nsi Kepulauan	167.500.000,00	162.960.750,00	97,29	100 Unit	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Bangka Belitung						
			<b>3. Output : Sarana Pengembang an Kawasan</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Area penyaluran benih padi dan Jagung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.632.500.000,00	2.561.159.250,00	97,29	7,095 Unit	97	APBN TH. 2021
4	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	711.957.000,00	695.380.920,00	97,67	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	97	APBN TH. 2021
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan	702.211.000,00	685.638.819,00	97,64	Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal serta Monitoring dan	97	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Tanaman Pangan		Bangka Belitung				Evaluasi Internal		
		3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021	1. Output : Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Kerjasama seta Layanan Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	418.754.000,00	408.871.405,00	97,64	24 Layanan	98	APBN TH. 2021
			2. Output : Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Layanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan	283.457.000,00	276.767.414,00	97,64	24 Laporan	97	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Data dan Rekomendasi		Bangka Belitung						
5	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8.302.321.000,00	8.234.826.568,00	99,19	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada Tanaman Tahunan dan Penyegar serta Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	100	APBN TH. 2021
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pengembang an Tanaman Tahunan dan Penyegar	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	407.200.000,00	378.044.480,00	92,84	Terlaksananya Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar serta Sarana Pengembangan Kawasan	100	APBN TH. 2021
		3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021	1. Output : Sarana Pengembang an Kawasan								

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Kawasan Jambu Mete (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahan an Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	407.200.000,00	378.044.480,00	92,84	100 Ha	100	APBN TH. 2021
			2. Kegiatan : Dukungan Perlindungan Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	362.090.000,00	361.438.238,00	99,82	Terlaksananya Dukungan Perlindungan Perkebunan	100	APBN TH. 2021
			1. Output : Sarana Pengembang an Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Area Penanganan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	362.090.000,00	361.438.238,00	99,82	125 Unit	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Kegiatan : Pengembang an Tanaman Semusim dan Rempah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5.735.300.000,00	5.720.961.750,00	99,75	Terlaksananya Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	100	APBN TH. 2021
			1. Output : Sarana Pengembang an Kawasan (Lada)								
			1. Rincian Kegiatan : Kawasan Lada	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5.735.300.000,00	5.720.961.750,00	99,75	325 Unit	100	APBN TH. 2021
			4. Kegiatan : Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	902.350.000,00	893.416.735,00	99,01	Terlaksananya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<b>1. Output : Standarisasi Produk</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	99.000.000,00	98.019.900,00	99,01	50 Produk	100	APBN TH. 2021
			<b>2. Output : Koordinasi</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	218.950.000,00	216.782.395,00	99,01	3 Kegiatan	100	APBN TH. 2021
			<b>3. Output : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>								

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	240.000.000,00	237.624.000,00	99,01	2 Unit	100	APBN TH. 2021
			<b>4. Output : Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahan an Pangan Provi nsi Kepulauan Bangka Belitung	344.400.000,00	340.990.440,00	99,01	2 Unit	100	APBN TH. 2021
			<b>5. Kegiatan : Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan</b>	<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan</b>	<b>895.381.000,00</b>	<b>880.965.365,00</b>	<b>98,39</b>	<b>Terlaksananya Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan</b>	<b>100</b>	<b>APBN TH. 2021</b>

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Bangka Belitung						
			<b>1. Output : Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	165.459.000,00	162.795.110,00	98,39	4 Rekomendasi Kebijakan	100	APBN TH. 2021
			<b>2. Output : Koordinasi</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan	80.405.000,00	79.110.479,00	98,39	2 Kegiatan	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Bangka Belitung						
			<b>3. Output : Sarana Pengembang an Kawasan</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	649.517.000,00	639.059.776,00	98,39	28 Unit	100	APBN TH. 2021
6	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	275.240.000,00	270.450.824,00	98,26	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Perkebunan	100	APBN TH. 2021
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan	275.240.000,00	270.450.824,00	98,26	Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Panganggaran Internal	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Lainnya Ditjen Perkebunan		Bangka Belitung						
		3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021	1. Output : Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Manjemen Satker Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	275.240.000,00	270.450.824,00	98,26	1 Layanan	100	APBN TH. 2021
7	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.197.868.000,00	1.183.469.496,00	98,80	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada Pakan Ternak dan Pengendalian Mutu Produksi	100	APBN TH. 2021
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang	1. Kegiatan : Peningkatan	Provinsi Kepulauan	Dinas Pertanian dan Ketahan an	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Meningkatnya Produksi Pakan Ternak yang	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Perbendaharaan Negara.	Produksi Pakan Ternak	Bangka Belitung	PanganProvinsi Kepulauan Bangka Belitung				memjamin Mutu dan Keamanan Pakan		
		3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021	1. Output : Penyidikan dan Pengujian Produk								
			1. Rincian Kegiatan : Mutu dan Keamanan Pakan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	10 Produk	100	APBN TH. 2021
			2. Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	55.300.000,00	55.272.350,00	99,95	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	100	APBN TH. 2021
			1. Output : Pelayanan Publik Lainnya								

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Hewan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	55.300.000,00	55.272.350,00	99,95	2 Layanan	100	APBN TH. 2021
			<b>3. Kegiatan : Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak</b>	<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>570.574.000,00</b>	<b>568.348.760,00</b>	<b>99,61</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak</b>	<b>100</b>	<b>APBN TH. 2021</b>
			<b>1. Output : Bantuan Kelompok Masyarakat</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Optimalisasi Reproduksi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	316.326.000,00	315.092.328,00	99,61	1.000 Kelompok Masyarakat	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Rincian Kegiatan : Optimalisasi Reproduksi (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	254.248.000,00	253.256.432,00	99,61	200 Kelompok Masyarakat	100	APBN TH. 2021
			4. Kegiatan : Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	339.250.000,00	327.308.400,00	96,48	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Veteriner	100	APBN TH. 2021
			1. Output : Sertifikasi Lembaga								
			1. Rincian Kegiatan : Sertifikasi Unit Usaha	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68.100.000,00	65.702.880,00	96,48	2 Lembaga	100	APBN TH. 2021
			2. Output : Sertifikasi Unit Usaha (PEN)								

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Sertifikasi Unit Usaha (PEN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian danKetahan an PanganProvi nsi Kepulauan Bangka Belitung	225.000.000,00	217.080.000,00	96,48	1 Lembaga	100	APBN TH. 2021
			<b>3. Output : Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Masyarakat yang Tereduksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	24.300.000,00	23.444.640,00	96,48	50 Orang	100	APBN TH. 2021
			<b>4. Output : Penyidikan dan Pengujian Produk</b>								

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Mutu dan Keamanan Produk Hewan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	21.850.000,00	21.080.880,00	96,48	50 Produk	100	APBN TH. 2021
			5. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	161.042.000,00	160.977.582,00	99,96	Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	100	APBN TH. 2021
			1. Output : Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan, Perbendahara an Internal, dan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan	122.915.000,00	122.865.834,00	99,96	1 Layanan	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pengelolaan Barang Milik Negara		Bangka Belitung						
			<b>2. Output : Layanan Data dan Informasi</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Data dan Informasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28.381.000,00	28.369.647,00	99,96	1 Layanan	100	APBN TH. 2021
			<b>3. Output : Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal</b>								
			1. Rincian Kegiatan :Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9.746.000,00	9.742.101,00	99,96	1 Laporan	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			6. Kegiatan : Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	51.702.000,00	51.562.404,00	99,73	Terlaksananya Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	100	APBN TH. 2021
			1. Output : Fasilitas dan Pembinaan Lembaga								
			1. Rincian Kegiatan : Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian danKetahan an PanganProvi nsi Kepulauan Bangka Belitung	51.702.000,00	51.562.404,00	99,73	1 Lembaga	100	APBN TH. 2021
8	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Penyediaan dan Pengembang an Prasarana dan Sarana Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	24.442.685.000,00	18.636.800.284,00	76,25	Terwujudnya Prasarana dan Sarana Pertanian yang memadai	89	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.321.400.000,00	2.321.400.000,00	100,00	Terlaksananya Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	100	APBN TH. 2021
		3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021	1. Output : Embung Pertanian, Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat, Jaringan Irigasi Tersier								
			1. Rincian Kegiatan : Rasio pemenuhan lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.321.400.000,00	2.321.400.000,00	100,00	24 Unit	100	APBN TH. 2021
			2. Kegiatan : Perluasan dan Perlindungan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	20.955.940.000,00	15.641.513.616,00	74,64	Terlaksananya Kegiatan Perluasan dan Perlindungan	57	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Lahan Pertanian		Kepulauan Bangka Belitung				Lahan Pertanian		
			1. Output : Optimasi Lahan								
			1. Rincian Kegiatan : Optimasi Lahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20.955.940.000,00	15.641.513.616,00	74,64	40 Km2	57	APBN TH. 2021
			3. Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	110.000.000,00	64.636.000,00	58,76	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	100	APBN TH. 2021
			1. Output : Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian								

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	110.000.000,00	64.636.000,00	58,76	1 Kegiatan	100	APBN TH. 2021
			4. Kegiatan : Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.055.345.000,00	609.250.668,00	57,73	Meningkatnya Ketersediaan Pupuk dan Pestisida	100	APBN TH. 2021
			1. Output : Tersedianya e-RDCK untuk PendataanPe nerima PupukBersub sidi dan LayananVerifi kasi dan ValidasiPener ima PupukBersub sidi								

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : e-RDCK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.055.345.000,00	609.250.668,00	57,73	7 Layanan	100	APBN TH. 2021
9	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	792.520.000,00	790.617.952,00	99,76	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Prasarana dan Sarana Pertanian	100	APBN TH. 2021
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	792.520.000,00	790.617.952,00	99,76	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Satker	100	APBN TH. 2021
		3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Satker								

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Dukungan Manajemen Satker	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	792.520.000,00	790.617.952,00	99,76	1 Layanan	100	APBN TH. 2021
10	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Infrastruktur Konektivitas	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12.884.547.000,00	12.884.547.000,00	100,00	Meningkatnya konektivitas jalan nasional dan Meningkatnya kemantapan jalan nasional	100	APBN TH. 2021
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12.884.547.000,00	12.884.547.000,00	100,00	Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Manajemen Satker	100	APBN TH. 2021
		3. UU No. 20 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021	1. Output : Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)								

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Preservasi Jalan dan Jembatan dalam Kota Pangkalpinang -Namang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	815.506.000,00	815.506.000,00	100,00	44.4 Km	100	APBN TH. 2021
			2. Rincian Kegiatan : Preservasi Jalan dan Jembatan dalam Kota Pangkalpinang -Namang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.028.912.000,00	2.028.912.000,00	100,00	44.4 Km	100	APBN TH. 2021
			3. Rincian Kegiatan : Preservasi Jalan dan Jembatan dalam Kota Pangkalpinang -Namang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.214.281.000,00	6.214.281.000,00	100,00	3.17 Km	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			4. Rincian Kegiatan : Revitalisasi Saluran Drainase Padat Karya Ruas Jalan Dalam Kota Pangkalpinang -Namang (Tambah Padat Karya)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.865.381.000,00	2.865.381.000,00	100,00	4.58 Km	100	APBN TH. 2021
			<b>2. Output : Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)</b>								
			1. Rincian Kegiatan : Preservasi Rutin Jembatan Pangkalpinang -Namang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	144.961.000,00	144.961.000,00	100,00	141.9 Meter	100	APBN TH. 2021
11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	693.162.000,00	647.397.000,00	93,40	Meningkatnya Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Kepulauan Bangka Belitung						
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	693.162.000,00	647.397.000,00	93,40	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	100	APBN TH. 2021
		3. UU No. 20 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021	1. Output : Layanan Umum								
			1. Rincian Kegiatan : Sistem Pelaporan Elektronik Kementerian PU	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30.720.000,00	30.180.000,00	98,24	1 Layanan	100	APBN TH. 2021
			2. Rincian Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	178.409.000,00	169.050.000,00	94,75	1 Layanan	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Rincian Kegiatan : Pelayanan Umum Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	416.151.000,00	394.974.000,00	94,91	1 Layanan	100	APBN TH. 2021
			4. Rincian Kegiatan : Kebutuhan Pencegahan COVID -19	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60.300.000,00	45.813.000,00	75,98	1 Layanan	100	APBN TH. 2021
			5. Rincian Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan BMN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7.582.000,00	7.380.000,00	97,34	1 Layanan	100	APBN TH. 2021
12	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	213.088.000,00	212.460.600,00	99,71	Terwujudnya suatu Kawasan Transmigrasi yang merupakan Prioritas Nasional	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	213.088.000,00	212.460.600,00	99,71	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan Sarana dan Prasarana yang memadai	100	APBN TH. 2021
		3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021	1. Output : Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat								
			1. Rincian Kegiatan : Fasilitas Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	52.800.000,00	52.800.000,00	100,00	27 Orang	100	APBN TH. 2021
			2. Output : Bantuan Peralatan / Sarana								

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80.288.000,00	79.800.600,00	99,39	1 Unit	100	APBN TH. 2021
			<b>3. Output : Sarana Pengembangan Kawasan</b>								
			1. Rincian Kegiatan : SAB yang Dibangun dan Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80.000.000,00	79.860.000,00	99,83	1 Unit	100	APBN TH. 2021
13	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	137.163.000,00	134.381.400,00	97,97	Terwujudnya Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	137.163.000,00	134.381.400,00	97,97	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TH. 2021
		3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021	1. Output : Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	137.163.000,00	134.381.400,00	97,97	1 Layanan	100	APBN TH. 2021
<b>TOTAL</b>						<b>62.670.491.000,00</b>	<b>54.684.915.350,00</b>	<b>87,26</b>		<b>98</b>	

### 3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 tidak dilaksanakan, karena tidak ada anggaran dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.

#### 3.2.1. Target Kinerja

Tidak ada

#### 3.2.2. Realisasi

Tidak ada

### 3.3 Permasalahan dan Kendala

- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  1. Kondisi Pembatasan Sosial dan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka mencegah penyebaran Pandemi Covid-19 Menyebabkan Kurang maksimalnya kegiatan Koordinasi, Bimtek, serta Monitoring dan Evaluasi.
  2. SDM Kelompok masih sangat terbatas (tingkat pendidikan petani yang masih rendah), serta Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat maka hal ini sering menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan.
- Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  1. Faktor Alam yaitu kondisi cuaca mengakibatkan perubahan pada jadwal pelaksanaan pekerjaan.
  2. Adanya penyesuaian volume pekerjaan terhadap kondisi di lapangan.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  1. Kurangnya SDM dalam rangka Optimalisasi Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi.
  2. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

### 3.4 Saran dan Tindak Lanjut

- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  1. Mengoptimalkan sistem pelatihan peningkatan kompetensi berbasis online dengan memanfaatkan ruang virtual dan media daring.
  2. Melakukan secara maksimal pelatihan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh petugas teknis dan Kelompok Tani pelaksana Kegiatan.
- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Memacu, mengawal, dan monitoring pengendalian setiap proses tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan antara lain dengan membuat rencana jadwal percepatan.
  2. Mendorong Penyedia jasa untuk meningkatkan stock persediaan peralatan dan material sesuai dengan kebutuhan proyek.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
    1. Melakukan Koordinasi dengan Disnaker dan Diknas Kabupaten/Kota terkait kebutuhan SDM dalam rangka mengotimalkan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi.
    2. Memperkuat koordinasi dan konsultasi kepada instansi/pihak Unit Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

## BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### 4.1. Urusan Pendidikan

SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### 4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan pendidikan antara lain:

- a. Pendidikan menengah dengan indikator pencapaian yaitu jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah;
- b. Pendidikan khusus dengan indikator pencapaian jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.

#### 4.1.2. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM untuk urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target
I.	<b>Pendidikan Menengah Atas</b>	<b>Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Atas</b>	30.435	100
	1.	buku teks pelajaran	1.400	100
	2.	perlengkapan belajar	1.400	100
	3.	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	941	100
	4.	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	68	100
	5.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.400	100
	6.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.618	100
	7.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	69	100

	8.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		217	100
<b>II.</b>	<b>Pendidikan Menengah Kejuruan</b>		<b>Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi</b>	20.243	<b>100</b>
	1.	buku teks pelajaran		8.617	100
	2.	perlengkapan belajar		8.617	100
	3.	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan		869	100
	4.	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c		58	100
	5.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		8.617	100
	6.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		1.564	100
	7.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		59	100
	8.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		176	100
<b>III.</b>	<b>Pendidikan Khusus</b>		<b>Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus</b>	1.188	100
	1.	materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas		1.188	100
	2.	perlengkapan belajar		1.188	100
	3.	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c		9	100
	4.	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan		309	100

	5.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		942	100
	6.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		139	100
	7.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		9	100
	8.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		8	100

#### 4.1.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian (Persentase) %	
<b>I.</b>	<b>Urusan Pendidikan</b>					
1.	Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah			100	
		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani		
		<b>30.435</b>	<b>30.435</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
	Mutu	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barabg/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	100	
	1.	buku teks pelajaran	1.400	1.400	0	100
	2.	perlengkapan belajar	1.400	1.400	0	100
	3.	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	941	941	0	100
	4.	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	68	68	0	100
	5.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.400	1.400	0	100
	6.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.618	1.618	0	100
	7.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	69	69	0	100
	8.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	217	217	0	100

<b>2.</b>	<b>Pendidikan Menengah Kejuruan</b>	<b>Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi</b>			<b>100</b>	
		<b>Jumlah Total yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total yang Terlayani</b>	<b>Jumlah Total yang Belum Terlayani</b>		
	<b>Jumlah yang Harus Dilayani</b>	<b>20243</b>	<b>20243</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
	Mutu	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barabg/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	100	
	1.	buku teks pelajaran	8617	8617	0	100
	2.	perlengkapan belajar	8617	8617	0	100
	3.	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	869	869	0	100
	4.	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	58	58	0	100
	5.	penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	8617	8617	0	100
	6.	kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1564	1564	0	100
	7.	kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	59	59	0	100
	8.	kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	176	176	0	100
<b>3.</b>	<b>Pendidikan Khusus</b>	<b>Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus</b>			<b>100</b>	
		<b>Jumlah Total yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total yang Terlayani</b>	<b>Jumlah Total yang Belum Terlayani</b>		
	<b>Jumlah yang Harus Dilayani</b>	<b>1188</b>	<b>1188</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
	Mutu	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barabg/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	100	
	1.	materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	1188	1188	0	100
	2.	perlengkapan belajar	1188	1188	0	100
	3.	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	9	9	0	100
	4.	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	309	309	0	100
	5.	penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	942	942	0	100
	6.	kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	139	139	0	100
	7.	kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	9	9	0	100
	8.	kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	8	8	0	100

Berdasarkan tabel di atas dari 3 (tiga) indikator Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan tersebut, semuanya telah mencapai target (100 %) dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan, yaitu jenis pelayanan Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus

#### 4.1.4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2021:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Pendidikan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	
1.	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>				
	a.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	10.742.880.616	10.511.858.129	97,85
	b.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	9.002.965.000	5.973.133.000	66,35
	c.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidik bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Kejuruan	30.732.800.000	30.732.800.000	100,00
	d.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/sekolah kejuruan	2.488.351.602	1.918.613.233	77,10
	e.	Penambahan Ruang Kelas Baru	4.861.819.991	3.395.935.991	69,85
	f.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.762.445.752	7.482.235.752	96,39

<b>2.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Kejuruan</b>				
	a.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.087.000.000	1.087.000.000	100,00
	b.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidik bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Kejuruan	31.541.600.000	31.541.600.000	100,00
	c.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/sekolah kejuruan	1.951.995.481	1.535.461.600	78,66
	d.	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.399.511.000	1.255.913.200	89,74
	e.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.505.000.000	2.153.968.200	85,99
<b>3.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>				
	a.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidik bagi Satuan Pendidikan Khusus	4.184.700.000	4.184.700.000	100,00
	b.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus	249.999.792	148.604.250	59,44
	c.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Khusus	1.923.072.275	1.649.987.190	85,80
	d.	Penambahan Ruang Kelas Baru	489.730.000	425.656.000	86,92

#### 4.1.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan pendidikan tahun 2021, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	5013
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	235

#### 4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan pendidikan pada tahun 2021 adalah pengumpulan data anak tidak sekolah sulit dilakukan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan meningkatkan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan dalam rangka pendataan anak tidak sekolah.

## 4.2. Urusan Kesehatan

SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan kesehatan antara lain:

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan indikator jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan

### 4.2.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 ditampilkan dalam tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target (%)
I.	<b>Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi</b>	<b>Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan</b>	<b>112.935</b>	<b>100</b>
	1. Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai		276	100
	2. Makanan Tambahan/ Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)		276	100
	3. Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)		0	0
II.	<b>Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi</b>	<b>Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar</b>	<b>52</b>	<b>100</b>
	1. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit		52	100
	2. Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin		52	100
	3. Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)		52	100
	4. Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot,		52	100

		Media Amies, dll) untuk Specimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit			
	5.	Wadah Pengiriman Spesimen (Specimen Carrier)		52	100
	6.	Tempat Sampah Biologis		52	100
	7.	Formulir: Form Penyelidikan Epidemiologi Form/Lembar KIE Alat Tulis yang Diperlukan		52	100

#### 4.2.3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian (Persentase) %
<b>II.</b>	<b>Urusan Kesehatan</b>				<b>91,67</b>
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan			83,33
		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani	112.935	112.935	0	100
	Mutu	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	66,67
	1. Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	276	276	0	100
	2. Makanan Tambahan/ Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)	276	276	0	100
	3. Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	0	0	0	0
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			100

		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani		
	<b>Jumlah yang Harus Dilayani</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
	Mutu	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100	
	1.	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	52	52	0	100
	2.	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	52	52	0	100
	3.	Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	52	52	0	100
	4.	Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk Specimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit	52	52	0	100
	5.	Wadah Pengiriman Spesimen (Specimen Carrier)	52	52	0	100
	6.	Tempat Sampah Biologis	52	52	0	100
	7.	Formulir : Form Penyelidikan Epidemiologi Form/Lembar KIE Alat Tulis yang Diperlukan	52	52	0	100

Berdasarkan tabel di atas dari 2 (dua) indikator Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan tersebut, 1 (satu) diantaranya telah mencapai target (100 %) dalam pemenuhan SPM bidang kesehatan, yaitu jenis pelayanan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

Sedangkan untuk jenis pelayanan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi realisasi capaian sebesar 83,33 %, hal ini dikarenakan untuk tahun 2021 tidak adanya penetapan target capaian (0 %) untuk mutu layanan Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)

#### 4.2.4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan kesehatan pada Tahun Anggaran 2021.

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Kesehatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1.	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>				
	a.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.918.520.486	743.404.150	38,74
	b.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	210.526.000	125.478.700	59,60

#### 4.2.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan kesehatan tahun 2021, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	44 orang
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	34 rang

#### 4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

- a. Tidak ada unit kerja khusus yang menangani krisis Kesehatan;
- b. Kurang optimalnya kinerja sub-sub Klaster Kesehatan;
- c. Belum disusunnya rencana kontijensi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana;
- d. Belum lancarnya sinergi seluruh Klaster Kebencanaan;

- e. Klaster Kesehatan belum ada SDM yang fokus menangani SPM;
- f. Sarana prasarana yang tidak memadai;
- g. Pencapaian SPM provinsi bukan prioritas kabupaten/kota yang memiliki target pencapaian yang berbeda;
- h. Belum terbentuknya struktur sekretariat yang mendukung SPM Kesehatan provinsi;

Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Membentuk unit kerja khusus yang menangani krisis Kesehatan;
- b. Melakukan koordinasi peningkatan kinerja Klaster Kesehatan;
- c. Penyusunan rencana kontijensi penanggulangan krisis Kesehatan akibat bencana;
- d. Melakukan koordinasi peningkatan sinergi antar kluster-klaster kebencanaan;
- e. Pembentukan sekretariat SPM Kesehatan Provinsi.;
- f. Pembentukan unit yang menangani pelaksanaan krisis Kesehatan dan KLB, bukan sebatas pengelola/pelaksana yang dapat disinergikan dengan PSC 119;
- g. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung;
- h. Advokasi pimpinan terhadap kabupaten/kota.
- i. Pembentukan unit yang menangani pelaksanaan krisis kesehatan dan KLB, bukan sebatas pengelola/pelaksana yang dapat di sinergikan dengan PSC 119;
- j. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung;
- k. Advokasi pimpinan terhadap kabupaten/Kota.

#### **4.3. Urusan Pekerjaan Umum**

SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

##### **4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar**

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan pekerjaan umum antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

#### 4.3.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target
I.	<b>Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota</b>	n/a	n/a
	Pelayanan SPAM lintas Kabupaten Kota		n/a	n/a
II.	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota</b>	<b>Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaen/Kota</b>	n/a	n/a
	1. Pelayanan SPAL-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPAL-S dengan kondisi wilayah perdesaaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan .		n/a	n/a
	2. Pelayanan Penyediaan Prasarana dan / atau Jasa melalui SPAL-T dengan kualitas pelayanan akses aman		n/a	n/a

#### 4.3.3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output	Total Pencapaian (Persentase) %		
III.	<b>Urusan Pekerjaan Umum</b>				
I.	<b>Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota</b>	n/a		
		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	
	Jumlah yang Harus Terlayani	n/a	n/a	n/a	n/a
	Mutu	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	n/a
	Pelayanan SPAM lintas Kabupaten Kota	n/a	n/a	n/a	n/a
II.	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota</b>	<b>Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaen/Kota</b>	n/a		
		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	
	Jumlah yang Harus Terlayani	n/a	n/a	n/a	n/a
	Mutu	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	n/a
	1. Pelayanan SPAL-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPAL-S dengan kondisi wilayah perdesaaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan .	n/a	n/a	n/a	n/a
	2. Pelayanan Penyediaan Prasarana dan / atau Jasa melalui SPAL-T dengan kualitas pelayanan akses aman	n/a	n/a	n/a	n/a

Berdasarkan tabel di atas 2 (dua) indikator Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum, realisasi capaian target 0%, hal ini dikarenakan untuk tahun 2021 tidak adanya penetapan target capaian baik untuk Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota maupun jenis pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota dikarenakan adanya permasalahan dan kendala tertentu.

Hal ini disebabkan terkendala belum adanya data pendukung terkait pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, belum adanya data pendukung terkait Pelayanan SPAL-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPAL-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan, belum adanya data pendukung terkait Pelayanan Penyediaan Prasarana dan/atau Jasa melalui SPAL-T dengan kualitas pelayanan akses aman. Begitu pula terkait alokasi anggaran untuk pemenuhan akses SPAM Regional, SPAL-T dan SPALD-R belum dilakukan secara spesifik di lokasi lintas Kabupaten/ Kota. Anggaran diperuntukkan bersifat kebijakan untuk pemenuhan akses pelayanan dasar.

Mulai tahun 2022 sampai dengan 2026, akan difokuskan pada penyediaan data dan kebijakan pemenuhan akses pelayanan dasar

#### 4.3.4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2021.

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Pekerjaan Umum	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan Persentase	
		Pagu	Realisasi		
<b>1.</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>				
	a.	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	-	-	-
	b.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	-	-	-
	c.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>				
	a.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	-	-	-
	b.	Peningkatan Sisten Pengelolaan Air	-	-	-

		Limbah Domestik Regional			
--	--	--------------------------	--	--	--

#### 4.3.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan pekerjaan umum tahun 2021, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator SPM	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	2 orang
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	2 orang

#### 4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

- a. Belum adanya data pendukung terkait Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
- b. Belum adanya data pendukung terkait Pelayanan SPAL-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPAL-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.
- c. Belum adanya data pendukung terkait Pelayanan Penyediaan Prasarana dan/atau Jasa melalui SPAL-T dengan kualitas pelayanan akses aman
- d. Alokasi anggaran belum dilakukan secara spesifik di lokasi Lintas
- e. Alokasi anggaran yang tersedia belum difokuskan pada pemenuhan akses SPAM Regional, SPAL-T dan SPALD-R. Anggaran yang terserap bersifat kebijakan untuk pemenuhan akses pelayanan dasar.
- f. Belum adanya lokasi yang disepakati untuk pembangunan baik Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat maupun Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional

Mulai tahun 2022 sampai dengan 2026, akan difokuskan pada penyediaan data dan kebijakan pemenuhan akses pelayanan dasar

#### 4.4. Urusan Perumahan Rakyat

SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

##### 4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan perumahan rakyat antara lain:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

##### 4.4.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target
I.	<b>Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi</b>	<b>Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		0	100
	2. Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana		0	100
	3. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana		0	100
	4. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana		0	100
II.	<b>Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi</b>	<b>Jumlah Rumah yang Layak Huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	1. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan		0	100

		Tanah dan/Atau Bangunan			
	2.	Penyediaan Rumah Layak Huni		0	100

#### 4.4.3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian (Persentase) %	
<b>IV.</b>	<b>Urusan Perumahan Rakyat</b>				<b>100</b>	
I.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni			100	
		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani		
	Jumlah yang Harus Dilayani	0	0	0	100	
	Mutu	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100	
	1.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	100
	2.	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	100
	3.	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	0	0	0	100
	4.	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0	100
II.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Rumah yang Layak Huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi			100	
		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani		
	Jumlah yang Harus Dilayani	0	0	0	100	
	Mutu	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100	
	1.	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	0	0	0	100
	2.	Penyediaan Rumah Layak Huni	0	0	0	100

Berdasarkan tabel di atas 2 (dua) indikator Standar Pelayanan Minimal urusan perumahan rakyat, realisasi capaian target 0%, hal ini dikarenakan untuk tahun 2020 tidak adanya bencana provinsi yang terjadi yang menyebabkan pemberian layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak bagi korban

bencana provinsi. Begitu pula untuk penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi, dikarenakan pada tahun 2020 tidak adanya program pemerintah daerah yang menyebabkan terjadinya relokasi masyarakat.

#### 4.4.4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM perumahan rakyat Tahun Anggaran 2021.

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Perumahan Rakyat	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1.	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Provinsi</b>				
	a.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	-	-	-
	b.	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	-	-	-
	c.	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	-	-	-
	d.	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	-	-	-
2.	<b>Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi</b>				
	a.	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	-	-	-
	b.	Penyediaan Rumah Layak Huni	-	-	-

#### 4.4.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan perumahan rakyat tahun 2021, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Dukungan Personil
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	- 4 orang PNS 1 orang PHL
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi	- 4 orang PNS 1 orang PHL

	masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	
--	---	--	--

#### 4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM ini khususnya untuk fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena realokasi program pemerintah daerah provinsi adalah personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sangat terbatas yaitu 4 orang PNS dan 1 orang PHL, yang apabila pelayanan dasar ini berjalan maka diperlukan penambahan personil yang sesuai untuk bisa ikut dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat.

### 4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### 4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi.

#### 4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target
I.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	0	0
	1. warga negara yang memperoleh		0	0

		elayanan kerugian materil			
	2.	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan		0	0
<b>II.</b>	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu</b>		<b>Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu</b>	<b>50</b>	<b>100 %</b>
	1.	Penegakan Perda sesuai SOP		50	100 %
	2.	Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar		50	100 %
	3.	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar		50	100 %

#### 4.5.3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian (Persentase) %
<b>V.</b>	<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				<b>50</b>
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			0
		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	
	Jumlah yang harus dilayani	0	0	0	0
	Mutu	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	0
	1.	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0
	2.	warga negara yang memperoleh pelayanan	0	0	0

		kerugian pelayanan pengobatan				
2.	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu</b>		<b>Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu</b>			<b>100</b>
			<b>Jumlah Total yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total yang Terlayani</b>	<b>Jumlah Total yang Belum Terlayani</b>	
	<b>Jumlah yang harus dilayani</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	Mutu		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100
	1.	Penegakan Perda sesuai SOP	50	50	0	100
	2.	Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	50	50	0	100
	3.	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	50	50	0	100

Berdasarkan tabel di atas dari 2 (dua) indikator Standar Pelayanan Minimal urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 1 (satu) indikator jenis pelayanan tercapai 100 % yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu.

Sedangkan untuk jenis pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi, pada tahun 2021 Satpol PP Provinsi belum menetapkan target dan anggaran untuk mutu layanan kerugian materiil dan pelayanan kerugian pengobatan (0 %), dikarenakan perangkat daerah terkait pada tahun 2020 kemarin masih belum memahami teknis penghitungan biaya dalam penganggaran kegiatan pemenuhan pelayanan kerugian materiil dan kerugian pengobatan

#### 4.5.4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Trantibum	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1.	<b>Kegiatan Lainnya</b>				
	a.	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban	6.908.695.750	6.536.007.304	94,61

		umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
	b.	Penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur	347.510.972	112.754.900	32,45

#### 4.5.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2021, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	Satpol PP PNS = 78 orang Satpol PP Non PNS = 151 orang

#### 4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Satpol PP diminta menyiapkan anggaran untuk pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan kepada warga Negara yang terkena dampak dari tindakan penegakan perda dan perkara oleh Satpol PP. Satpol PP Provinsi Kep. Bangka Belitung belum mendapatkan contoh konkret atas penerapan SPM ini dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara. Jika Satpol PP harus menyiapkan pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan, apakah kode rekening belanja tersedia dan bagaimana standar belanjanya.
- b. Satpol PP Provinsi Kep. Bangka Belitung memiliki program dan kegiatan dalam menunjang mutu layanan SPM ini yaitu kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- c. Berdasarkan Permendagri diatas dan memperhatikan masalah-masalah diatas, maka solusi saat ini yang dilakukan adalah menindak pelanggaran perda dan perkara yang benar-benar diyakini kebenarannya, dan menghindari bentrok fisik

dengan tujuan mengurangi resiko tuntutan masyarakat atas pelayanan kerugian materil dan pengobatan.

#### **4.6. Urusan Sosial**

SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

##### **4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar**

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan sosial antara lain:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial dengan indikator capaian jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti;
- e. Perlindungan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

##### **4.6.2. Target Pencapaian SPM**

Target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 ditampilkan pada table berikut ini

:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target (%)
I.	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Anak Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya</b>	<b>14</b>	<b>100</b>
	1. Pengasuhan		10	100
	2. Penyediaan Permakanan bagi Daerah yang Memiliki Panti Anak		10	0
	3. Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak		0	0
	4. Penyediaan Sandang		10	100
	5. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Anak		2	100
	6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti		1	100
	7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial		4	100
	8. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		3	100
	9. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		3	100
	10. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		3	100
	11. Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti		0	100
	12. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		0	100
	13. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar		4	100
	14. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang		0	100

		Belum Memiliki Panti Anak			
	15.	Fasilitas Pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak		14	100
	16.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		0	0
<b>II.</b>	<b>Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial</b>		<b>Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial</b>	<b>20</b>	<b>100</b>
	1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia		0	100
	2.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		0	100
	3.	Penyediaan Sandang		10	100
	4.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia		2	100
	5.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia		0	0
	6.	Penyediaan Alat bantu		10	100
	7.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Sosial		1	100
	8.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial		4	100
	9.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		3	100
	10.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk		0	0
	11.	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar		10	100

	12.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		10	100
	13.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		10	100
	14.	Pemulasaraan		0	0
	15.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia		10	100
	16.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		0	0
<b>III.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial</b>		<b>Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis		0	0
	2.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis Merujuk Ke Panti Masyarakat		0	0
	3.	Penyediaan Sandang		0	0
	4.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis		10	100
	5.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis		0	0
	6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti		0	0

	7.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial		0	0
	8.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari		0	0
	9.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		0	0
	10.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		0	0
	11.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar		0	0
	12.	Pemulangan ke Daerah Asal		0	0
	13.	Penyediaan Permukiman Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis		0	0
	14.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		0	0
<b>IV.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial</b>		<b>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya</b>	30	100
	1.	Penyediaan Permukiman Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas		0	0
	2.	Penyediaan Sandang		20	100
	3.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas		2	100
	4.	Penyediaan Alat bantu		8	100
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti		1	100
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual		16	100
	7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		3	100

	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk		3	100
	9.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		14	100
	10.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		0	0
	11.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		0	0
	12.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas		20	100
	13.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		20	100
	14.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		0	0
	15.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas		0	0
<b>V.</b>	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah korban bencana alam dan sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	3.749	100
	1.	Penyediaan Sandang		1.582	100
	2.	Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		5	100
	3.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		9	100
	4.	Pelayanan Dukungan Psikososial		0	0
	5.	Penyediaan Permakanan		2.167	100

#### 4.6.3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian (Persentase) %
<b>VI.</b>	<b>Urusan Sosial</b>				<b>66,92</b>
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar di dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya			80
		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani	14	14	0	100
	Mutu	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	60
	1. Pengasuhan	10	10	0	100
	2. Penyediaan Permakanan bagi Daerah yang Memiliki Panti Anak	10	3	7	30
	3. Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak	0	0	0	0
	4. Penyediaan Sandang	10	3	7	30
	5. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Anak	2	2	0	100
	6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	1	1	0	100
	7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	4	4	0	100
	8. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	3	3	0	100
	9. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	3	3	0	100
	10. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3	3	0	100
	11. Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	0	0	0	0
	12. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0
	13. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	4	4	0	100
	14. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak	0	0	0	0
	15. Fasilitas Pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	14	14	0	100

	16.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0
2.	<b>Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial</b>		<b>Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya</b>			<b>81,25</b>
			<b>Jumlah Total yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total yang Terlayani</b>	<b>Jumlah Total yang Belum Terlayani</b>	
		<b>Jumlah yang Harus Dilayani</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		Mutu	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	62,50
	1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia	0	0	0	0
	2.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0
	3.	Penyediaan Sandang	10	10	0	100
	4.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia	2	2	0	100
	5.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia	0	0	0	0
	6.	Penyediaan Alat bantu	10	10	0	100
	7.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Sosial	1	1	0	100
	8.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	4	4	0	100
	9.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	3	3	0	100
	10.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk	0	0	0	0
	11.	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	10	10	0	100
	12.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	10	10	0	100
	13.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10	10	0	100
	14.	Pemulasaraan	0	0	0	0
	15.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia	10	10	0	100
	16.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang	0	0	0	0

		Belum Memiliki Pant Lanjut Usia dan Merujuk Ke Pant Masyarakat				
3.	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant Sosial</b>		<b>Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant yang Terpenuhi Kebutuhannya</b>			<b>0</b>
			<b>Jumlah Total yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total yang Terlayani</b>	<b>Jumlah Total yang Belum Terlayani</b>	
	<b>Jumlah yang Harus Dilayani</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Mutu		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	0
	1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Pant Gelandangan dan Pengemis	0	0	0	0
	2.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Pant Gelandangan dan Pengemis Merujuk Ke Pant Masyarakat	0	0	0	0
	3.	Penyediaan Sandang	0	0	0	0
	4.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Pant Gelandangan dan Pengemis	0	0	0	0
	5.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Pant Gelandangan dan Pengemis	0	0	0	0
	6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Pant	0	0	0	0
	7.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	0	0	0	0
	8.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari	0	0	0	0
	9.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	0	0	0	0
	10.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0
	11.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0	0
	12.	Pemulangan ke Daerah Asal	0	0	0	0
	13.	Penyediaan Permakanan Bagi	0	0	0	0

		Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis				
	14.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial</b>		<b>Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhannya</b>			<b>83,33</b>
			<b>Jumlah Total yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total yang Terlayani</b>	<b>Jumlah Total yang Belum Terlayani</b>	
		<b>Jumlah yang Harus Dilayani</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		Mutu	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	66,67
	1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0
	2.	Penyediaan Sandang	20	20	0	100
	3.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas	2	2	0	100
	4.	Penyediaan Alat bantu	8	8	0	100
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	1	1	0	100
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	16	16	0	100
	7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	3	3	0	100
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk	3	33	0	100
	9.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	14	14	0	100
	10.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0	0
	11.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0
	12.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas	20	20	0	100
	13.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20	20	0	100

	14.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0
	15.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0
5.	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya</b>			<b>90</b>
			<b>Jumlah Total yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total yang Terlayani</b>	<b>Jumlah Total yang Belum Terlayani</b>	<b>1</b>
		<b>Jumlah yang Harus Dilayani</b>	<b>3749</b>	<b>3749</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		Mutu	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	80
	1.	Penyediaan Sandang	1582	1582	0	100
	2.	Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	5	5	0	100
	3.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	9	9	0	100
	4.	Pelayanan Dukungan Psikososial	0	0	0	0
	5.	Penyediaan Permakanan	2167	2167	0	100

Berdasarkan tabel di atas dari 5 (lima) indikator Standar Pelayanan Minimal urusan sosial tersebut, 1 (satu) diantaranya telah mencapai target (100 %) dalam pemenuhan SPM bidang sosial, yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.

Untuk layanan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial realisasi capaian pada Tahun 2021 sebesar 66,92 %. Capaian ini dikarenakan untuk mutu layanan bagi daerah yang belum memiliki panti anak baik target maupun realisasinya 0 %. Hal ini dikarenakan Provinsi Kep. Bangka Belitung telah memiliki panti anak.

Begitu pula dengan layanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam Panti Sosial realisasi capaian pada Tahun 2021 sebesar 81,25 %. Capaian ini dikarenakan untuk mutu layanan bagi daerah yang belum memiliki panti lanjut usia baik target maupun realisasinya 0 %. Hal ini dikarenakan Provinsi Kep. Bangka Belitung telah memiliki panti lanjut usia.

Untuk layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam Panti Sosial realisasi capaian pada Tahun 2021 sebesar 83,33 %. Capaian ini dikarenakan untuk mutu layanan bagi daerah yang belum memiliki panti penyandang disabilitas terlantar

baik target maupun realisasinya 0 %. Hal ini dikarenakan Provinsi Kep. Bangka Belitung telah memiliki panti penyandang disabilitas terlantar.

Sedangkan 1 (satu) indikator lainnya belum memenuhi target maupun capaian SPM (0 %) yaitu : Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti, hal ini dikarenakan sampai Tahun 2021 belum adanya panti sosial yang membidang gelandangan dan pengemis baik milik pemerintah daerah maupun milik masyarakat/ swasta.

Namun untuk indikator yang belum tercapai tersebut yaitu Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial pada tahun 2022 nanti direncanakan akan direvisi Peraturan Gubernur tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM di Dalam UPTD, menjadi jenis Pelayanan Dasar multi layanan, termasuk juga layanan Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial, sehingga target layanan dapat tercapai.

#### 4.6.4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan sosial Tahun Anggaran 2021.

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Pendidikan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
<b>1.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>			
a.	Pengasuhan	15.980.000	12.280.000	76,85
b.	Penyediaan Sandang	8.636.992	8.636.990	100,00
c.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	37.700.000	11.600.000	30,77
d.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari	11.098.744	7.370.917	66,41
e.	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas	8.110.000	7.194.840	88,72
f.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.630.000	6.110.000	92,16
g.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.945.000	8.610.000	78,67
h.	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	3.235.000	2.975.100	91,97
<b>2.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti</b>			

	a.	Penyediaan Sandang	10.040.000	10.000.000	99,60
	b.	Penyediaan Alat Bantu	18.980.000	14.398.000	75,85
	c.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	30.306.239	27.483.995	90,68
	d.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	71.287.000	48.036.200	67,38
	e.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	18.027.692	17.717.692	98,28
	f.	Pemulasaran	3.000.000	-	-
<b>3. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial</b>					
<b>4. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>					
	a.	Penyediaan Permakanan	167.965.800	139.520.000	83,06
	b.	Penyediaan Sandang	33.528.439	17.129.550	51,09
	c.	Penyediaan Alat Bantu	19.030.000	16.280.000	85,55
	d.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	29.995.128	17.277.183	57,60
	e.	Pemberiaan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	91.913.706	74.720.188	81,29
	f.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	185.340.000	185.340.000	100,00
	g.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.158.000	15.190.600	88,53
<b>5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi bagi Korban Bencana Daerah Provinsi</b>					
	a.	Pemberian Makanan	349.630.000	324.800.000	92,90
	b.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	90.862.000	35.184.292	38,72
	c.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	31.974.000	26.258.600	82,12

#### 4.6.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan sosial tahun 2021, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	34 orang

2.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	
3.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	-
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	30 orang
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	500 orang

#### 4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM urusan sosial antara lain :

- a. Permasalahan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial dan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti sosial adalah petunjuk operasional dari Panti Sosial Bina Serumpun (PSBS) adalah berdasarkan Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM di Dalam UPTD Panti Sosial Bina Serumpun, bahwa Jenis Pelayanan Dasar didalam PSBS meliputi rehabilitasi sosial dasar anak terlantar, rehabilitasi sosial ABH dan rehabilitasi sosial dasar orang terlantar. Peraturan Gubernur ini akan direvisi sehingga multi layanan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan SPM.
- b. Permasalahan Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial adalah belum adanya pelayanan di panti sosial yang membidang gelandangan dan pengemis.
- c. Permasalahan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti sosial adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di panti.
- d. Permasalahan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi adalah ada beberapa korban bencana yang tidak termasuk dalam kriteria penerima yaitu terkena dampak tetapi

tidak termasuk kategori ringan, sedang ataupun berat, masuk dalam wilayah lokasi bencana namun tidak terdampak bencana, terdampak bencana kondisi rusak ringan dan mampu secara ekonomi dan material serta korban yang terdampak bencana baik berat, sedang maupun ringan namun mampu dan tidak mau menerima bantuan dan merasa tidak layak untuk dibantu.

#### 4.7. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan 6 (enam) urusan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

##### 4.7.1. Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Dinas Pendidikan
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
<b>3</b>	<b>Program Pengembangan Kurikulum</b>	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
<b>4</b>	<b>Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</b>	
	Pemindahan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra</b>	
	Pembinaan, Pengembangan Dan Perlindungan Bahasa Dan Sastra Yang Penuturannya Lintas	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
	Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
<b>6</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>7</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
<b>8</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>9</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
<b>10</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>11</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>12</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>13</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
<b>14</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>15</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
<b>16</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>17</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>18</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
19	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
20	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
21	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
22	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
23	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
24	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
25	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
26	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
27	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
28	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>29</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>30</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>31</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>32</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>33</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>34</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>35</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>36</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>37</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>38</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>39</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>40</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>41</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>42</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>43</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>44</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>45</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>46</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>47</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>48</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>49</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>50</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>51</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>52</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>53</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>54</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>55</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>56</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>57</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>58</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>59</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
<b>60</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>61</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>62</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>63</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>64</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
65	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
66	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
67	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
68	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
69	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
70	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
71	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
72	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
73	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
74	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
75	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>76</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>77</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>78</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>79</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>80</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>81</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>82</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>83</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>84</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>85</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>86</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>87</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>88</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>89</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>90</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>91</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>92</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>93</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
94	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
95	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
96	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
97	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
98	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
99	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
100	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
101	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
102	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
103	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>104</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
<b>105</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>106</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>107</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>108</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>109</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>110</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>111</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
112	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
113	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
114	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
115	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
116	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
117	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
118	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
119	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
120	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
121	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
122	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
123	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
124	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
125	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
126	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
127	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
128	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
129	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>130</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>131</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>132</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>133</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>134</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>135</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>136</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>137</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>138</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
<b>139</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>140</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>141</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>142</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>143</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>144</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>145</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>146</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>147</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>148</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>149</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>150</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>151</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>152</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>153</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>154</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>155</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>156</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>157</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>158</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>159</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>160</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>161</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>162</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>163</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>164</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>165</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>167</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>168</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>169</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>170</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>171</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>172</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>173</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>174</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
<b>175</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>176</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
<b>177</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>178</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
<b>179</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>180</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
<b>181</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>182</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
183	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
184	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
185	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
186	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
187	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
188	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
189	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
190	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
191	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

#### 4.7.2. Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Dinas Kesehatan
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>2</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provins	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Provinsi	
	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
<b>4</b>	<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</b>	
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (Pbf) Cabang Dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Pak)	
	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Ukot)	
<b>5</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (Kie) Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	
	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Ukbm) Tingkat Daerah Provinsi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
7	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Peningkatan Pelayanan Blud	
8	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
9	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	
	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Provinsi	
	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
10	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provins</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Peningkatan Pelayanan Blud	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>11</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
<b>12</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Provinsi	
	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
<b>13</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

#### 4.7.3. Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)</b>	
	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
<b>3</b>	<b>Program Penyelenggara N Jalan</b>	
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Sipjaki) Cakupan Daerah Provinsi	
<b>5</b>	<b>Program Penyelenggara N Penataan Ruang</b>	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
<b>6</b>	<b>Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</b>	
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Provinsi	
<b>7</b>	<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
<b>8</b>	<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
<b>9</b>	<b>Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee</b>	
	Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
<b>10</b>	<b>Program Penatagunaan Tanah</b>	
	Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
11	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
12	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
13	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	
	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
14	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten/Kota	
15	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regiona	
16	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	
	Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
17	<b>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</b>	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
18	<b>Program Penyelenggara N Jalan</b>	
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
19	<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Sipjaki) Cakupan Daerah Provinsi	
20	<b>Program Penyelenggara N Penataan Ruang</b>	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
21	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	
	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	
22	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)</b>	
	Urusan Penyelenggaraan Psu Permukiman	
23	<b>Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</b>	
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Provinsi	
24	<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
25	<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah	
26	<b>Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee</b>	
	Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provins	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>27</b>	<b>Program Penatagunaan Tanah</b>	
	Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
<b>28</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

#### 4.7.4. Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>1</b>	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten/Kota	
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	
<b>3</b>	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	
	Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
<b>4</b>	<b>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</b>	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
<b>5</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	
	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)</b>	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	

#### 4.7.5. Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Satuan Polisi Pamong Praja
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur	
<b>3</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan N, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
	<b>BPBD</b>	
<b>4</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>5</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

#### 4.7.6. Program dan Kegiatan Urusan Sosial

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Dinas Sosial
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>2</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
3	<b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	
4	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Dan NAPZA Di Dalam Panti	
5	<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>	
	Pengangkatan Anak Antar WNI Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
6	<b>Program Penanganan Bencana</b>	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Provinsi	
7	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
8	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
9	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	
10	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>11</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	
<b>12</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>13</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
<b>14</b>	<b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	
<b>15</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Dan NAPZA Di Dalam Panti	
<b>16</b>	<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>	
	Pengangkatan Anak Antar WNI Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
<b>17</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Provinsi	
<b>18</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
<b>19</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	
<b>20</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	
	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
<b>21</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</b>	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah	
<b>22</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>23</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
<b>24</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>25</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	

## **BAB V PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 memuat capaian kinerja yang terdiri dari profil daerah, perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam LPPD sebagai informasi utama. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja kunci.

Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2021 mencapai kinerja sangat baik. Namun demikian harus disadari pula bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam kendala dan hambatan yang menyebabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal. Hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dalam aspek Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, Regulasi maupun Anggaran serta pandemi covid-19. Meskipun demikian, dengan segala kekurangan dan hambatan tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu menunjukkan hasil kerjanya yaitu dengan memperoleh penghargaan atas Penyelenggaraan Pemerintah dari pemerintah pusat. Perolehan penghargaan tersebut tidak lepas dari hasil kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan support dan partisipasi konstruktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun efisiensi penyelenggaraan pemerintahan terhadap pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan diraihnya predikat WTP atas LKPD Tahun 2021.

Demikian Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun untuk memenuhi pertanggung jawaban Pemerintah Daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan. Dengan harapan Laporan ini dapat menjadi referensi dan sekaligus bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tahun – tahun yang akan datang.